

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**Kawasan Gunung Kijang,
Kabupaten Bintan**

**WIDAYATUN
ALI YANSYAH ABDURRAHIM**



INDONESIA PINTAR PUBLISHING



LIPI



COREMAP-LIPI

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kawasan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan

Oleh :
Widayatun
Ali Yansyah Abdurrahim

Layout :
Sutarno

Desain Cover :
Puji Hartana

ISBN :
978-602-8942-60-7



INDONESIA PINTAR PUBLISHING (Anggota IKAPI)
Billymoon Jl. Tumpi 1, Blok CE 4, No. 10
Pondok Kelapa Duren Sawit – Jakarta Timur
www.indonesiapinter-net, e-mail: indopinter@yahoo.com

Bekerjasama dengan



LIPI



COREMAP-LIPI

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI dan COREMAP-LIPI
Jln. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430
Telp. 62-21-64713850, Fax: 62-21-64711948
Website: <http://oseanografi.lipi.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP Fase II bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan yang sekaligus juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Bintan, COREMAP II diimplementasikan di tiga kawasan, yaitu Bintan Timur, Gunung Kijang, dan Tambelan. Desa yang menjadi lokasi COREMAP II di Kawasan Gunung Kijang, di antaranya, adalah Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang. Di kedua desa ini, COREMAP II diimplementasikan sejak tahun 2006/2007 melalui berbagai program dan kegiatan, seperti penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang, pengelolaan dan pengawasan terumbu karang berbasis masyarakat, pengembangan kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA), serta pembangunan berbagai sarana fisik desa.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan COREMAP dilakukan kajian, baik dari aspek ekologi maupun sosial ekonomi. Kajian sosial ekonomi yang dilakukan adalah kajian dasar sosial ekonomi pada awal program (T0), kajian *benefit monitoring and evaluation* (BME) sosial ekonomi pada tengah program (T1), dan kajian BME sosial ekonomi pada akhir program (T2). Kajian dasar sosial ekonomi (T0) dilakukan pada tahun 2007 dengan tujuan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum program. Kajian kajian BME sosial ekonomi tengah program (T1) dilakukan pada tahun 2009 dengan tujuan mengkaji implementasi COREMAP di tingkat kabupaten dan tingkat kawasan/desa serta memantau dampak COREMAP terhadap tingkat pendapatan kesejahteraan masyarakat. Kajian kajian BME

sosial ekonomi akhir program (T2) dilakukan pada tahun 2011 dengan tujuan mengkaji capaian pelaksanaan COREMAP, dampaknya terhadap perubahan pendapatan terutama dikaitkan dengan kegiatan MPA, dan manfaat pembangunan sarana fisik yang didanai COREMAP.

Buku yang berjudul Pengelolaan Terumbu Karang dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan ini merupakan hasil kajian BME sosial ekonomi akhir program (T2) yang dilakukan pada tahun 2011. Buku ini berisi capaian pelaksanaan COREMAP, dampaknya terhadap perubahan pendapatan terutama dikaitkan dengan kegiatan MPA, dan manfaat pembangunan sarana fisik yang didanai COREMAP bagi masyarakat di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, terutama kepada para *enumerator* di Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang ; para narasumber di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Pemerintahan Desa Malang Rapat, Pemerintahan Desa Gunung Kijang, LPSTK dan Pokmas di Desa Malang Rapat, LPSTK dan Pokmas di Desa Malang Rapat, masyarakat di kedua desa; dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penelitian ini. Selain itu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan kerja kami yang membantu kelancaran kerja, seperti rekan-rekan bagian keuangan, kerja sama, serta bagian dokumentasi dan informasi.

Jakarta, Desember 2011

Penulis

RINGKASAN

Tujuan COREMAP adalah melestarikan terumbu karang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi program. Program ini menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat atau *Community Based Management* (CBM). Karena itu, dalam program ini masyarakat menjadi subyek dalam pelaksanaan program. Pengelolaan berbasis masyarakat atau CBM menjadi komponen utama dalam pelaksanaan COREMAP dan untuk mendukung serta memperlancar kegiatan CBM, komponen ini didukung oleh komponen lainnya, seperti peningkatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang atau *Public Awareness* (PA); pengawasan dan penegakan hukum atau *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS); serta data dan informasi dari pusat riset, informasi and training atau *Coral Reef Information and Training Center* (CRITCs).

Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Bintan diawali dengan pembentukan lembaga pengelola di tingkat kabupaten. Lembaga pengelola COREMAP di tingkat kabupaten adalah Project Implementation Units (PIU) yang secara organisatoris berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan. PIU membawahi berbagai kegiatan COREMAP yang berkaitan dengan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM); penyadaran masyarakat atau *Public Awareness* (PA); pengawasan dan penegakan hukum (MCS); serta pelatihan, pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan kondisi terumbu karang dan sosial-ekonomi masyarakatnya.

Di Kabupaten Bintan, COREMAP diimplementasikan di tiga kecamatan, yaitu Bintan Timur, Gunung Kijang, dan Tambelan. Pada masing-masing kecamatan dipilih beberapa desa sebagai lokasi

program. Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang adalah dua di antara beberapa desa lokasi COREMAP di Kecamatan Gunung Kijang.

COREMAP diimplentasikan di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang mulai tahun 2006. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 berbagai kegiatan telah dilakukan, di antaranya, yaitu sosialisasi dan penyadaran tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang, pembentukan lembaga pengelola sumber daya terumbu karang (LPSTK) dan kelompok masyarakat (Pokmas), pengembangan kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA), dan pembangunan sarana fisik desa, seperti tambatan perahu, pondok informasi, bangsal kerja, sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta sarana air bersih.

Indikasi keberhasilan program dari aspek sosial adalah adanya perubahan perilaku dari kegiatan yang merusak menjadi kegiatan yang positif untuk menyelamatkan dan melestarikan terumbu karang. Dari aspek ekonomi keberhasilan program dapat dilihat dari adanya perubahan atau peningkatan pendapatan, khususnya pendapatan yang bersumber dari kegiatan yang telah difasilitasi oleh COREMAP.

Secara umum, kajian ini menemukan bahwa pelaksanaan program penyelamatan terumbu karang di Kawasan Gunung Kijang telah berjalan cukup baik dan cukup berhasil, baik dilihat dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dari aspek sosial dapat dilihat dari penurunan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun seperti bus, potas dan sianida. Demikian pula dengan kegiatan penangkapan yang menggunakan bom juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Seiring dengan menurunnya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan bom, kondisi terumbu karang di beberapa lokasi menunjukkan adanya perbaikan persentase tutupan karang. Hasil monitoring kondisi karang yang dilakukan oleh CRITC-LIPI menunjukkan bahwa tutupan karang hidup di perairan Numbing menunjukkan adanya peningkatan. Pada

tahun 2007 persentase tutupan karang sebesar 49,35 persen meningkat menjadi 53,67 persen pada tahun 2011 (CRITC – LIPI, 2011). Meningkatnya kondisi karang diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan setempat.

Dari aspek ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat di dua desa yang menjadi sampel kajian. Sejak dimulainya COREMAP sampai dengan tahun 2011, pendapatan rumah tangga telah naik sebesar 125,1 persen atau sekitar 31,5 persen per tahun. Pada tahun 2011, pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.784.310. Empat tahun sebelumnya, yaitu pada saat kegiatan COREMAP dimulai tahun 2007 pendapatan rumah tangga sebesar Rp 792.240.

Gambaran berhasilnya COREMAP di Kawasan Gunung Kijang dari aspek ekonomi juga terlihat dari peningkatan pendapatan per-kapita yang secara signifikan telah naik dari sebesar 140,3 persen atau terjadi kenaikan per tahun sebesar 35,1 persen per tahun. Pada tahun 2007, pendapatan per kapita sebesar Rp 226.530 naik menjadi Rp 544.482 pada tahun 2011. Pendapatan per-kapita masyarakat di Kawasan Kijang ini berada diatas garis kemiskinan per-kapita Kabupaten Bintan Tahun 2009 yang nilainya sebesar Rp 260.143.

Kenaikan pendapatan juga terjadi pada rumah tangga yang mempunyai sumber penghasilan dari kegiatan kenelayanan, baik nelayan tangkap atau budidaya. Meskipun mengalami fluktuasi, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menunjukkan kenaikan sebesar 92 persen selama periode 2007 sampai dengan 2011. Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan naik cukup signifikan pada kurun waktu 2007-2009. Kenaikan pendapatan mencapai 148 persen. Namun, pada periode 2009 -2011 pendapatan dari kegiatan kenelayanan mengalami sedikit penurunan sekitar 23 persen. Penurunan ini terutama dialami oleh nelayan yang berpenghasilan di atas Rp 3 juta per bulan. Rumah tangga nelayan

yang berpenghasilan di atas Rp 3 juta per bulan, umumnya, adalah nelayan kelong dengan target tangkapan utama ikan teri. Pada saat survei dilakukan bulan Juli, hasil tangkapan nelayan sedikit mengalami penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan bulan Juli sampai dengan Agustus adalah masa di mana hasil tangkap kurang maksimal karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Di samping hasilnya tidak maksimal, biaya operasional juga bertambah. Meningkatnya biaya operasional semakin mengurangi penghasilan nelayan.

Berhasilnya COREMAP di kawasan ini juga terlihat dari kenaikan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas yang mendapat bantuan untuk pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA). Pendapatan rumah tangga penerima dana MPA telah meningkat lebih dari 10 persen selama dua tahun (2009-2011). Pada tahun 2009, pendapatan rumah tangga anggota Pokmas penerima dana MPA sebesar Rp 1.518.090 meningkat menjadi Rp 1.683.350 pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas penerima dana MPA ini lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga yang bukan Pokmas.

Di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang ada 19 Pokmas yang mendapatkan dana untuk pengembangan MPA. Sebanyak 13 Pokmas berada di Desa Malang Rapat dan sebanyak 6 Pokmas berada di Desa Gunung Kijang. Capaian kegiatan Pokmas di kedua desa cukup bervariasi, ada yang cukup sukses, tetapi adapula yang gagal.

Di Desa Malang Rapat, dari 13 Pokmas yang telah mendapat dana MPA sekitar 9 Pokmas yang masih beraktifitas dengan kinerja yang berbeda-beda dan sisanya 4 Pokmas sudah tidak beraktifitas. Dari 9 Pokmas yang masih aktif, ada tiga Pokmas yang kinerjanya cukup baik dan berhasil, yaitu Pokmas Bandeng, Silaturahmi, dan Pokmas Truno Tunggal. Pokmas Bandeng dan Pokmas Silaturahmi

merupakan Pokmas yang melakukan kegiatan pembuatan kerupuk ikan, sedangkan Pokmas Truno Tunggal merupakan Pokmas yang melakukan kegiatan budidaya pembesaran lele.

Di Desa Gunung Kijang, dari keenam Pokmas yang ada terdapat satu Pokmas yang kinerjanya cukup baik, yaitu Pokmas Trunojoyo yang melakukan kegiatan budidaya pembesaran lele. Dua Pokmas, yaitu Ketam Renjong dan Kuda Laut yang melakukan kegiatan budidaya kerapu terlihat masih aktif dan sudah melakukan panen, tetapi hasilnya belum maksimal. Sedangkan, tiga Pokmas lainnya, yaitu Pokmas Sotong Karang dan Tembakul yang melakukan kegiatan budidaya kepiting serta Pokmas Agar-agar yang melakukan kegiatan pembuatan kerupuk sampai kajian ini dilakukan sudah tidak menunjukkan adanya aktifitas lagi.

Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan COREMAP supaya tujuan COREMAP dapat tercapai dengan lebih lebih baik dan lebih cepat, COREMAP juga memberikan bantuan berupa pembangunan sarana fisik desa. Sarana fisik yang dibangun di Desa malang Rapat adalah tambatan perahu, bangsal kerja dan ruang promosi, pondok informasi, serta sarana MCK. Sementara itu, sarana fisik yang dibangun di Desa Gunung Kijang adalah tambatan perahu, pondok informasi, sarana MCK, tempat pembuangan sampah, sarana air bersih, dan pengerasan jalan. Berbagai sarana fisik yang dibangun tersebut memberikan manfaat yang cukup bervariasi. Hasil observasi, wawancara, dan survai menunjukkan adanya sarana fisik yang memberikan manfaat sangat besar, namun ada pula yang memberikan manfaat sangat kecil.

Tambatan perahu yang dibangun di kedua desa merupakan sarana fisik yang dinilai memberikan manfaat yang sangat besar bagi nelayan dan masyarakat pesisir di kedua desa. Dengan adanya tambatan perahu, nelayan menjadi lebih mudah menambatkan

perahunya; proses naik turun awak nelayan/penumpang dan hasil tangkapan pun menjadi lebih mudah; serta konstruksinya yang kokoh pun membuat perahu yang ditambatkan menjadi lebih aman. Selain itu, dengan terpusatnya kegiatan menurunkan hasil laut di satu tempat, yaitu tambatan perahu, mengundang para pembeli hasil tangkap, baik tengkulak, pokmas pembuat kerupuk ikan, maupun konsumen rumah tangga, untuk datang langsung membeli ikan. Hal ini mempermudah nelayan memasarkan hasil tangkapannya. Untuk lebih mendukung kegiatan kenelayanan mereka, termasuk proses pemasaran hasilnya, nelayan di Desa Malang Rapat juga membangun rumah singgah/gudang dan tempat parkir motor.

Besarnya manfaat yang dirasakan oleh nelayan dan masyarakat terhadap tambatan perahu ditunjukkan dan dipertegas dengan hasil survai. Hasil survai menunjukkan sebanyak 63 persen responden menyatakan pembangunan tambatan perahu sangat bermanfaat, 25 persen menyatakan bermanfaat, dan 5 persen menyatakan cukup bermanfaat. Hanya 3 persen dan 2 persen saja yang menyatakan kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat.

Sementara itu, bangsal kerja dan ruang promosi serta pondok informasi di Desa Malang Rapat merupakan dua contoh sarana fisik desa yang kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada saat kajian dilakukan, kedua sarana fisik ini terlihat kosong, tidak ada aktivitas, dan terkunci rapat. Padahal kalau dikelola dengan baik, kedua sarana fisik tersebut bisa digunakan sesuai fungsinya. Bangsal kerja dan ruang promosi, misalnya, bisa digunakan sebagai pusat pemasaran hasil produksi pokmas-pokmas. Pondok informasi, selain digunakan sebagai pusat informasi COREMAP dan sekretariat/kantor LPSTK pondok informasi bisa juga digunakan oleh pihak lain. Pihak desa maupun warga masyarakat lainnya bisa menggunakannya sebagai tempat pertemuan masyarakat, tempat singgah nelayan,

maupun penyelenggaraan acara tingkat kampung dan desa, seperti arisan, posyandu, dan lain-lain.

Adanya sarana fisik yang belum memberikan manfaat secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah ketidakmampuan LPSTK mengelola berbagai sarana fisik tersebut. Faktor yang kedua adalah kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi dari berbagai sarana fisik tersebut. Faktor ketiga adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai sarana fisik tersebut. Rendahnya partisipasi masyarakat bisa jadi karena sejak awal masyarakat merasa tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan berbagai sarana fisik tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, proses pembangunan semua sarana fisik tersebut dilakukan oleh kontraktor. Partisipasi masyarakat dan pihak desa hanyalah menyediakan lahan. Satu-satunya proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan pondok informasi yang dilakukan melalui mekanisme *community contract*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELAMATAN TERUMBU KARANG DI DESA MALANG RAPAT DAN GUNUNG KIJANG.....	 13
2.1. Sosialisasi Program dan Pembentukan Kelembagaan	 14
2.2. Kegiatan MPA	18
2.3. Pembangunan Sarana Fisik Desa.....	37
 BAB III PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KAWASAN GUNUNG KIJANG	 53
3.1. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga dan Per- kapita	54
3.2. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan.....	61
3.3. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas Penerima Dana MPA	69

BAB IV	PENUTUP	81
	4.1. Kesimpulan.....	81
	4.2. Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA.....		99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pokmas Penerima/Pelaksana dan Jenis Kegiatan MPA di Desa Gunung Kijang dan Desa Malang Rapat	22
Tabel 2.2.	Sarana Fisik Bantuan COREMAP di Desa Gunung Kijang dan Desa Malang Rapat	39
Tabel 3.1.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Tahun 2007, 2009, dan 2011	56
Tabel 3.2.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Tahun 2006, 2008 dan 2011(Persen)	59
Tabel 3.3.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Tahun 2007, 2009 dan 2011	64
Tabel 3.4.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2007, 2009 dan 2011 (Persen).....	65
Tabel 3.5.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana Mata Pencanharian Alternatif Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Tahun 2006, 2008 dan 2011.....	71

Tabel 3.6. Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Mata Pencarian Alternatif (MPA) Menurut Kelompok Pendapatan di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Tahun 2009 dan 2011.....	73
Tabel 3.7. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Pokmas dan Non- Pokmas Di Kawasan Gunung Kijang, Tahun 2011	74

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1.	Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Mata Pencapaian Alternatif (MPA) Menurut Kegiatan Usaha di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, 2011 (N 25)	21
Diagram 2.2.	Pengaruh Kegiatan MPA dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas	34
Diagram 2.3.	Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Mata Pencapaian Alternatif (MPA) Menurut Alasan Pendapatan Tidak Meningkat.....	35
Diagram 2.4.	Pendapat Responden tentang Manfaat Pembangunan Tambatan Perahu.....	42
Diagram 2.5.	Pendapat Responden tentang Manfaat Pembangunan Pondok Informasi	47
Diagram 2.6.	Pendapat Responden tentang Manfaat Pembangunan MCK dan Tempat Sampah	50
Diagram 3.1.	Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga dan Per-kapita Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang, Tahun 2007 – 2009	58
Diagram 3.2.	Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Tahun 2007, 2009 dan 2011	67

Diagram 3.3. Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Tahun 2007, 2009 dan 2011 (Persen)	68
Diagram 3.4. Perkembangan Pendapatan Per-kapita dan Rata-rata Rumah Tangga Penerima Dana MPA, Di Desa Kijang dan Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Tahun 2009-2011 (Persen)	73
Diagram 3.5. Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas Penerima Dana MPA dan Non Pokmas di Kawasan Kijang, Tahun 2009 dan 2011	76

4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Kabupaten Bintan.....	2
Gambar 1.2.	Kondisi Terumbu Karang di Perairan Desa Malang Rapat.....	3
Gambar 1.3.	Peta Desa Malang Rapat	6
Gambar 1.4.	Lahan Bekas Galian Pasir dan Batu Granit di Gunung Kijang.....	8
Gambar 2.1.	<i>Billboard</i> COREMAP II di Desa Malang Rapat..	15
Gambar 2.2.	Lokasi DPL Desa Malang Rapat.....	17
Gambar 2.3.	<i>Billboard</i> DPL Desa Malang Rapat	18
Gambar 2.4.	Salah Satu Pameran yang Diikuti PIU COREMAP Bintan untuk Mempromosikan Produk-produk Pokmas.....	20
Gambar 2.5.	Kelong Apung Wisata Bahari-Pokmas Tenggiri..	27
Gambar 2.6.	Kolam Ikan Lele Bantuan COREMAP-Pokmas Truno Tunggal	28
Gambar 2.7.	Kerupuk Ikan Pokmas Bandeng dengan Merek Kerupuk “Atom”.....	30
Gambar 2.8.	Proses Pembuatan Kerupuk Ikan Pokmas Bandeng	31
Gambar 2.9.	Kerupuk Ikan Pokmas Silaturahmi dengan Merek Kerupuk “Endon”	32

Gambar 2.10. Proses Pembuatan Kerupuk Ikan Pokmas Silaturahmi.....	33
Gambar 2.11. Kolam Lele Pokmas Truno Tunggal-Bantuan KUBE.....	36
Gambar 2.12. Kolam Lele Pokmas Truno Tunggal-Bantuan COREMAP	37
Gambar 2.13. Tamabatan Perahu Desa Malang Rapat	40
Gambar 2.14. Tambatan Perahu Desa Malang Rapat	40
Gambar 2.15. Tambatan Perahu Desa Gunung Kijang.....	41
Gambar 2.16. Bangsal Kerja dan Ruang Promosi LPSTK Desa Malang Rapat	43
Gambar 2.17. Pondok Informasi LPSTK Desa Malang Rapat ...	44
Gambar 2.18. Pondok Informasi LPSTK Desa Gunung Kijang.	46
Gambar 2.19. Tempat Sampah Desa Gunung Kijang.....	48
Gambar 2.20. Tong Sampah Desa Gunung Kijang.....	49
Gambar 2.21. Sarana Air Bersih Desa Gunung Kijang	4 [*] 51
Gambar 3.1. Kegiatan Kenelayanan di Desa Malang Rapat.....	63
Gambar 3.2. Penjemuran Ikan Teri/Bilis di Desa Malang Rapat	69

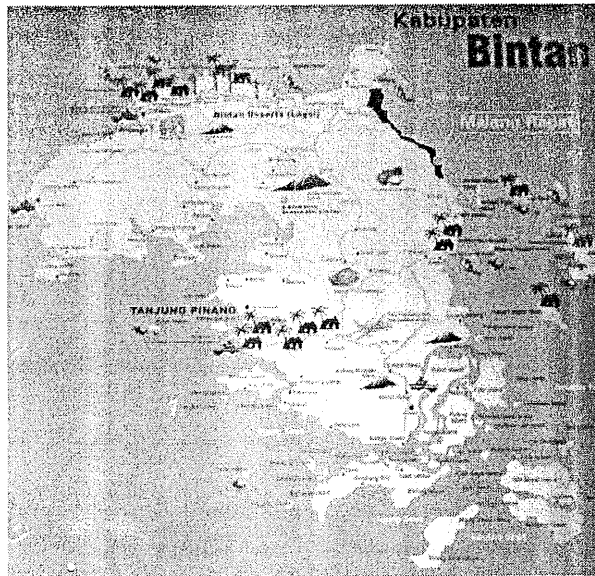
BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Bintan lebih dari 98 persen wilayahnya merupakan perairan yang kaya akan berbagai potensi sumber daya laut. Salah satunya adalah terumbu karang. Luas sebaran terumbu karang di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 7.521,8 km² dengan kondisi yang cukup bervariasi. Di beberapa lokasi, persentase tutupan karang tidak mencapai 20 persen, tetapi sebaliknya terdapat juga lokasi-lokasi yang tutupan karangnya diatas 50 persen. Pada tahun 2007, persentase tutupan karang di beberapa lokasi di perairan Kabupaten Bintan berkisar antara 11,43 persen hingga 58,1 persen (CRITC- COREMAP, 2007). Sebaran terumbu karang tersebut menjadi tempat tumbuh dan berkembangbiaknya berbagai jenis ikan karang, seperti ikan sunu, kerapu, kurisi dan ikan putih dan lain-lain. Selain itu jenis ikan dan biota lainnya yang potensial di wilayah ini adalah ikan tongkol, kakap, tenggiri, teri dan ketam.

Walaupun pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang di wilayah ini belum optimal, akan tetapi telah terjadi kerusakan karang di berbagai lokasi. Kerusakan terumbu karang yang terjadi di beberapa lokasi di wilayah perairan Kabupaten Bintan, diantaranya, disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan beracun (potas/bius) dan bahan peledak (bom). Sejak tahun 1990an, seiring dengan meningkatnya perdagangan ikan hidup, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun (potas/bius/sianida) sangat marak terjadi di wilayah perairan Kabupaten Bintan. Kegiatan penangkapan ikan hidup dengan menggunakan bahan beracun ini marak dilakukan karena permintaan ikan hidup yang cukup tinggi. Di Kabupaten Bintan, khususnya di

wilayah Bintan Timur terdapat beberapa agen pengeksport ikan hidup untuk pasaran Singapura dan Hongkong.



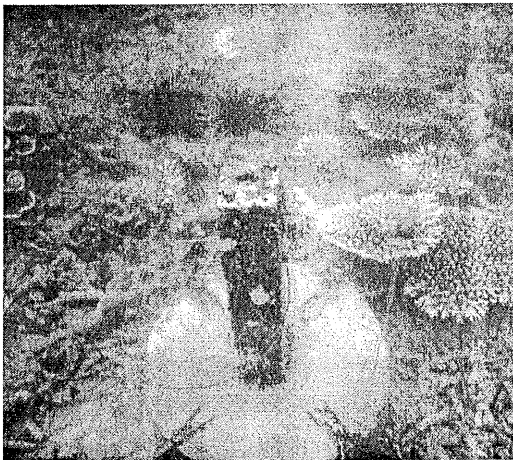
Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Bintan

(Sumber: Poster di Kantor Desa Malang Rapat, 2011)

Dalam rangka memenuhi target ekspor ikan hidup, masing-masing agen pengesksport ini bekerjasama dengan beberapa pengumpul ikan (*tauke*) yang ada di di tingkat desa atau pulau. *Tauke* yang ada di desa-desa atau pulau memanfaatkan nelayan setempat untuk menangkap ikan hidup dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan bius. Untuk memenuhi target pengumpulan ikan, *tauke* memberikan pinjaman armada (perahu), alat dan bahan untuk menangkap ikan dan modal untuk melaut seperti bahan bakar dan ransum (makanan dan rokok) kepada nelayan setempat dengan syarat hasil tangkapan harus dijual kepada *tauke* dengan harga yang ditentukan oleh *tauke*. Selain itu,

tauke juga menanggung kebutuhan sehari-hari nelayan, seperti beras dan lauk-pauk yang pembayarannya diperhitungkan pada saat nelayan menjual hasil tangkapnya kepada *tauke*. Kondisi ini membuat nelayan berlomba untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, termasuk menggunakan potas, bus dan sianida nelayan berupaya memenuhi target tangkapan. Hal ini dilakukan karena umumnya mereka telah terjerat hutang kepada *tauke* untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal yang hampir serupa juga terjadi untuk perdagangan ikan segar. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor ikan segar, para pekspor juga bekerjasama dengan para *tauke* di tingkat desa. Untuk memenuhi target tangkapan, para nelayan menggunakan bom. Ironisnya walaupun hasil tangkapan cukup baik, tetapi kehidupan nelayan masih tetap dalam kondisi memprihatinkan karena harga dikendalikan oleh *tauke*. Dengan demikian kerusakan karang sebagai akibat dari penggunaan bahan dan alat tangkap yang merusak tidak dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.2.

Kondisi Terumbu Karang di Perairan Desa Malang Rapat

(Sumber: http://regional.coremap.or.id/bintan/galeri_foto/)

Penggunaan bahan beracun (potas, sianida dan racun) dan bom yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini ditengarai telah berkontribusi terhadap peningkatan kerusakan karang di wilayah perairan Kabupaten Bintan (lihat Gambar 1.2). Kondisi terumbu karang di wilayah Kabupaten Bintan akan semakin kritis apabila kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* ini apabila tidak dihentikan. Oleh karena itu, untuk mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya laut secara berlebih dan menekan laju kerusakan terumbu karang, Kabupaten Bintan dipilih menjadi salah satu kabupaten yang menjadi lokasi program penyelamatan dan pelestarian terumbu karang nasional. Program ini dinamakan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* atau disingkat COREMAP.

Tujuan COREMAP adalah melestarikan terumbu karang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi program. Program ini menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat atau *Community Based Management* (CBM). Karena itu, dalam program ini masyarakat menjadi subyek dalam pelaksanaan program. Pengelolaan berbasis masyarakat atau CBM menjadi komponen utama dalam pelaksanaan COREMAP dan untuk mendukung serta memperlancar kegiatan CBM, komponen ini didukung oleh komponen lainnya, seperti peningkatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang atau *Public Awareness* (PA); pengawasan dan penegakan hukum atau *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS); serta data dan informasi dari pusat riset, informasi and training atau *Coral Reef Information and Training Center* (CRITCs).

Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Bintan diawali dengan pembentukan lembaga pengelola di tingkat kabupaten. Lembaga pengelola COREMAP di tingkat kabupaten adalah Project Implementation Units (PIU) yang secara organisatoris berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan. PIU membawahi berbagai kegiatan COREMAP yang berkaitan dengan Pengelolaan

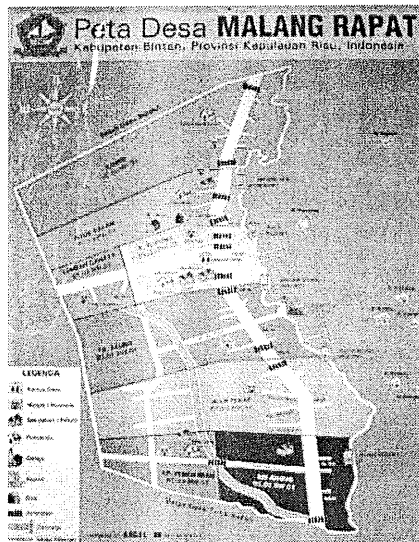
Berbasi Masyarakat (PBM); penyadaran masyarakat atau *Public Awareness* (PA); pengawasan dan penegakan hukum(MCS); serta pelatihan, pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan kondisi terumbu karang dan sosial-ekonomi masyarakatnya.

Di Kabupaten Bintan, COREMAP diimplementasikan di tiga kecamatan, yaitu Bintan Timur, Gunung Kijang, dan Tambelan. Pada masing-masing kecamatan dipilih beberapa desa sebagai lokasi program. Pelaksanaan COREMAP di tingkat desa diawali dengan kegiatan sosialisasi tentang tujuan COREMAP melalui berbagai media, seperti: ceramah, dikusi dalam pertemuan desa, rapat-rapat dan pertemuan informal lainnya; pemutaran film; dan pembuatan poster, *billboard* serta *leaflet*. Kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan COREMAP dalam rangka menggugah peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelamatan dan pengelolaan terumbu karang yang ada di wilayah masing-masing desa.

Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi, dilakukan pembentukan lembaga pengelola sumber daya terumbu karang (LPSTK) di tingkat desa. Pembentukan pengurus LPSTK difasilitasi oleh staff dari PIU bekerjasama dengan perangkat desa setempat. LPSTK terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Setelah LPSTK terbentuk, petugas dari PIU dan pengurus LPSTK bekerjasama dengan perangkat desa mengembangkan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK). Secara umum RPTK berisi uraian tentang potensi dan kondisi terumbu karang yang ada di perairan desa, jenis pemanfaatan yang telah dilakukan masyarakat dan kegiatan yang dianggap dapat mengancam kelestariannya. Berdasarkan potensi dan pemanfaatan tersebut kemudian dibuat pemetaan permasalahan dan dibuat strategi dan langkah-langkah untuk pengelolaan dan pelestarian. Setelah LPSTK terbentuk, di tingkat desa juga dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk mendukung implementasi kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat (CBM). Pokmas

yang dibentuk terdiri dari tiga, yaitu Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pokmas Jender, dan Pokmas Konservasi.

Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang adalah dua di antara beberapa desa lokasi COREMAP di Kecamatan Gunung Kijang. Desa Malang Rapat terletak di jalur utama menuju daerah wisata Pantai Trikora. Kondisi jalan dari pusat kota Tanjung Pinang menuju desa ini cukup bagus. Demikian pula, akses dan kondisi jalan menuju dusun-dusun yang berada di desa ini cukup bagus dan hampir semuanya dapat dilalui kendaraan roda empat. Sementara itu, Desa Gunung Kijang terletak di wilayah pesisir pantai timur Pulau Bintan. Akses jalan menuju kantor desa ini lumayan baik, berupa jalan aspal dan pengerasan beton. Namun demikian dari kantor desa menuju ke dusun-dusun umumnya masih merupakan jalan tanah dan beberapa diantaranya merupakan jalan setapak yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.



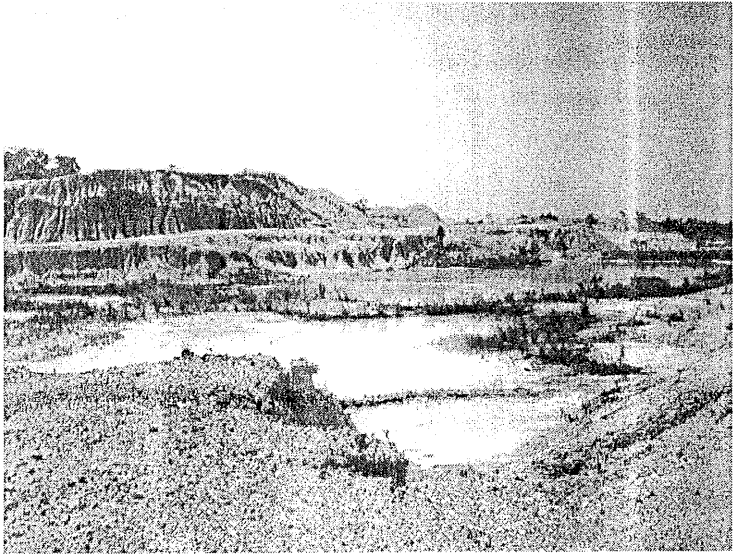
Gambar 1.3.
Peta Desa Malang Rapat
(Sumber: Poster di Kantor Desa Malang Rapat)

Selain mempunyai potensi sumber daya laut, kedua desa ini juga mempunyai potensi sumber daya darat yang sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi sumber daya darat yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya adalah perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa ini merupakan usaha turun-temurun yang sudah dilakukan sejak lama. Namun demikian potensi perkebunan kelapa ini sudah menurun hasilnya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peremajaan tanaman kelapa sehingga hasil panennya tidak maksimal. Di samping itu, sebagian kebun kelapa telah banyak yang dikonversi menjadi lahan untuk usaha pariwisata, pembangunan perumahan dan kepentingan umum lainnya.

Potensi sumber daya darat yang telah dimanfaatkan adalah bahan tambang galian pasir dan batu granit. Kegiatan penambangan pasir dengan volume cukup besar dengan tujuan ekspor ke Singapura yang dikelola oleh perusahaan swasta sudah dilarang kira-kira dua tahun yang lalu. Namun, dampak ekologiannya masih tersisa terlihat dari adanya bekas-bekas galian yang berbentuk kubangan-kubangan dan rawa-rawa yang ada di dalam wilayah desa (lihat Gambar 1.3). Penambangan batu granit sebagian besar dilakukan oleh perusahaan swasta. Kegiatan pemanfaatan batu granit yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dalam skala kecil yang dilakukan dengan cara membeli batu granit dari perusahaan kemudian diolah menjadi batu granit yang berukuran lebih kecil.

Selain potensi sumber daya darat berupa perkebunan dan pertambangan, Desa Malang Rapat juga mempunyai wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Di sepanjang pantai dari arah Gunung Kijang menuju Desa Malang Rapat terdapat beberapa lokasi yang mempunyai panorama indah dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Beberapa objek wisata dan *cottage* telah dibangun oleh perusahaan dan perorangan. Demikian pula di wilayah Gunung Kijang, beberapa *cottage* sudah

dibangun, beberapa diantaranya dibangun oleh perusahaan asing dari Singapura.



Gambar 1.4.
Lahan Bekas Galian Pasir dan Batu Granit di Gunung Kijang
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Jumlah penduduk Desa Malang Rapat pada tahun 2010 sebanyak 1.743 orang, terdiri dari 936 orang laki-laki dan 807 orang perempuan (KK). Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 5,5% dari jumlah penduduk pada tahun 2008 (Monografi Desa Malang Rapat, 2010; Romdiati dan Djohan, 2009). Sementara itu, jumlah penduduk Desa Gunung Kijang pada tahun 2010 sebanyak 1.779, terdiri dari 964 orang laki-laki dan 815 orang perempuan serta terbagi ke dalam 437 kepala keluarga (KK). Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 5,0% dari jumlah penduduk pada tahun 2008 (Monografi Desa Gunung Kijang, 2010; Romdiati dan Djohan, 2009).

Penduduk di kedua desa sangat beragam dan berasal dari berbagai etnik. Selain orang Melayu sebagai penduduk lokal, terdapat juga penduduk pendatang yang jumlahnya cukup besar. Penduduk pendatang umumnya berasal dari Jawa, Flores, dan Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan dan Tenggara. Penduduk pendatang ini umumnya sudah lama menetap di wilayah ini. Sebagian besar di antara mereka merupakan generasi kedua--lahir di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang dari orang tua yang pindah dari daerah asalnya dan merantau ke Bintan dan menetap di ke dua desa ini--.

Walaupun belum ada data statistik tentang jenis pekerjaan penduduk yang tersedia, dari pengamatan dan wawancara dapat diketahui bahwa pekerjaan penduduk di kedua desa cukup beragam. Sebagian besar penduduk bekerja di bidang kenelayan dan pertanian. Sebagian lainnya bekerja sebagai bidang jasa (pegawai negeri dan perusahaan wisata), perdagangan, industri pengolahan, dan penggalian pasir. Pekerjaan penduduk di Desa Malang Rapat lebih beragam dibandingkan pekerjaan penduduk Desa Gunung Kijang. Hal disebabkan letak Desa Malang Rapat berada di jalur utama ke kawasan wisata Pantai Trikora sehingga kesempatan untuk bekerja dan berusaha lebih banyak dan lebih beragam. Di jalur ini, sudah terdapat beberapa tempat wisata dan jumlahnya semakin bertambah, baik yang dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta. Dampak positif dari adanya pengembangan wisata di wilayah ini adalah meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

COREMAP diimplentasikan di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang mulai tahun 2006. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 berbagai kegiatan telah dilakukan, di antaranya, yaitu sosialisasi dan penyadaran tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang, pembentukan lembaga pengelola sumber daya terumbu karang (LPSTK) dan kelompok masyarakat (Pokmas), pengembangan

kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA), dan pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti tambatan perahu, pondok informasi, bangsal kerja, sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta sarana air bersih.

Kegiatan sosialisasi dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang yang dilakukan di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang cukup berhasil. Hal ini terlihat dari penurunan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun seperti bius, potas dan sianida. Demikian pula dengan kegiatan penangkapan yang menggunakan bom juga menunjukkan penurunan yang signifikan.

Seiring dengan menurunnya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan bom, kondisi terumbu karang di beberapa lokasi menunjukkan adanya perbaikan persentase tutupan karang. Hasil monitoring kondisi karang yang dilakukan oleh CRITC-LIPI menunjukkan bahwa tutupan karang hidup di perairan Numbing menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2007 persentase tutupan karang sebesar 49,35 persen meningkat menjadi 53,67 persen pada tahun 2011 (CRITC – LIPI, 2011). Meningkatnya kondisi karang diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan setempat.

Buku ini berisi kajian tentang pelaksanaan program penyelamatan terumbu karang di Kawasan Gunung Kijang, khususnya Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. Sumber data yang dipergunakan adalah hasil Studi Data Dasar Aspek Sosial-Ekonomi Terumbu Karang Tahun 2007 serta Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi Terumbu Karang yang dilakukan tahun 2009 dan 2011. Studi Data Dasar dan BME Sosial-Ekonomi dilaksanakan oleh CRITC-

COREMAP bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI).

Studi Data Dasar tahun 2007 serta BME Sosial-Ekonomi Terumbu Karang tahun 2009 dan 2011 menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam mengumpulkan data. Pendekatan kuantitatif ditujukan untuk memperoleh data di tingkat rumah tangga yang dilakukan melalui survai dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan. Data di tingkat rumah tangga yang dikumpulkan mencakup karakteristik demografi dan sosial-ekonomi anggota rumah tangga dan pendapatan rumah tangga.

Survai Data Dasar tahun 2007 dilakukan terhadap sekitar 100 rumah tangga sampel di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang. Pemilihan sampel dilakukan secara acak berdasarkan daftar rumah tangga yang ada di masing-masing kampung. BME Sosial-Ekonomi tahun 2009 dan 2011 dilakukan terhadap sampel rumah tangga yang sama dengan Survai Data Dasar Sosial-Ekonomi tahun 2007. Namun demikian, pada BME Sosial-Ekonomi tahun 2009 dan 2011 beberapa rumah tangga sampel harus diganti karena ada yang telah pindah ke luar desa dan ada yang tidak bisa ditemui pada saat survai dilakukan. Pemilihan rumah tangga pengganti diupayakan mempunyai karakteristik sosial-ekonomi yang hampir sama dengan rumah tangga yang digantikan.

Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara terbuka (semi struktur), *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber yang ada di tingkat kabupaten dan di tingkat desa. Narasumber di tingkat kabupaten, di antaranya, adalah Ketua PIU (pengelola COREMAP di tingkat Kabupaten), koordinator masing-masing komponen dan penyuluh lapangan COREMAP II untuk Kawasan Gunung Kijang. Informasi dan data yang dikumpulkan pada

tingkat kabupaten diantaranya adalah data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan program, kegiatan yang telah dan akan dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara itu, narasumber di tingkat desa meliputi nelayan, pengurus LPSTK, ketua dan anggota Pokmas, perangkat pemerintahan desa, pemuka atau tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya yang mengetahui tentang potensi dan pengelolaan terumbu karang di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang. Informasi yang dikumpulkan pada tingkat desa diantaranya adalah program dan kegiatan penyelamatan terumbu karang di tingkat desa, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut (SDL), produksi, dan pemasaran.

Buku ini terdiri dari empat Bab, diawali dengan pendahuluan yang isinya mencakup uraian tentang potensi dan kondisi terumbu karang di wilayah Kabupaten Bintan dan upaya pelestariannya. Selain itu pada bagian ini juga disajikan gambaran singkat Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang sebagai salah satu lokasi program penyelamatan terumbu karang di Kabupaten Bintan. Bab II berisi uraian tentang pelaksanaan program penyelamatan terumbu karang (COREMAP) di tingkat desa. Uraian pada bab ini utamanya terfokus pada program dan kegiatan berkaitan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA) dan pembangunan sarana fisik desa untuk menunjang kegiatan penyelamatan terumbu karang. Perubahan pendapatan masyarakat akan disajikan pada Bab III. Bab ini menganalisis perubahan pendapatan rumah tangga, per-kapita, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan dan pendapatan anggota Pokmas yang menerima dana MPA. Bab IV adalah penutup yang berisi rangkuman tentang pelaksanaan program penyelamatan terumbu karang, perubahan pendapatan masyarakat, dan isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELAMATAN TERUMBU KARANG DI DESA MALANG RAPAT DAN GUNUNG KIJANG

Bab ini berisi uraian tentang pelaksanaan kegiatan penyelamatan terumbu karang melalui COREMAP di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang. Kegiatan akan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu kegiatan berkaitan dengan sosialisasi dan pembentukan kelembagaan, kegiatan Mata Pencanharian Alternatif (MPA), dan kegiatan pembangunan sarana fisik desa.

Kegiatan sosialisasi COREMAP dilakukan pada awal program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan program penyelamatan terumbu karang. Sementara itu, kegiatan MPA merupakan kegiatan ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat (Pokmas) di lokasi program. Masyarakat yang mata pencahariannya bertumpu pada pemanfaatan sumber daya laut, khususnya perikanan melalui kegiatan MPA, diharapkan berpartisipasi memelihara kelestariannya tanpa mengurangi pendapatan yang diperoleh. Sedangkan, kegiatan pembangunan sarana fisik merupakan kegiatan pemberian bantuan berupa pembangunan sarana fisik oleh COREMAP yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya terumbu karang yang dilakukan LPSTK dan Pokmas.

2.1. Sosialisasi Program dan Pembentukan Kelembagaan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pengelola COREMAP di tingkat kabupaten bekerjasama dengan fasilitator¹. Sosialisasi COREMAP yang telah dimulai sejak tahun 2006/2007 ini dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya, dilakukan melalui pertemuan desa dan pertemuan informal lainnya. Di dalam pertemuan tersebut disampaikan informasi yang berkaitan dengan program dan tujuan COREMAP yang akan dilaksanakan di desa untuk memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan penyelamatan terumbu karang. Selain melalui ceramah dan diskusi, sosialisasi juga dilakukan dengan cara pemutaran video tentang penyelamatan terumbu karang.

Pemasangan *billboard* tentang penyelamatan terumbu karang dilakukan di berbagai tempat strategis di sekitar wilayah desa. Sedangkan poster tentang penyelamatan terumbu karang di pasang di kantor desa dan tempat-tempat lainnya yang sering dipakai untuk pertemuan warga di desa. Pemasangan *billboard* dan poster ini untuk menunjang kampanye penyelamatan terumbu karang kepada masyarakat luas.

¹ Fasilitator adalah pekerja yang dikontrak oleh pengelola COREMAP di tingkat kabupaten sebagai *project implementation unit* (PIU) untuk melaksanakan dan memantau berbagai kegiatan COREMAP di lokasi program.



Gambar 2.1.

Billboard COREMAP II di Desa Malang Rapat

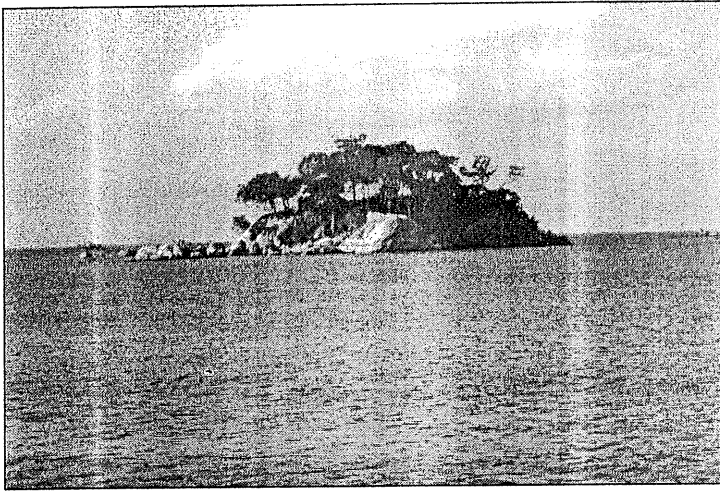
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) di Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang telah dilakukan pada tahun 2007. Pengurus LPSTK terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara. Pengurus dipilih oleh masyarakat dan calon yang akan dipilih menjadi pengurus umumnya orang yang memiliki pekerjaan di bidang kenelayanan. Untuk memberikan pembekalan dan pemahaman kepada para pengurus LPSTK tentang program dan kegiatan COREMAP, pengelola di tingkat kabupaten bekerjasama dengan fasilitator melakukan berbagai pelatihan berkaitan dengan manajemen lembaga, administrasi dan pembukuan keuangan (Romdiati dan Djohan, 2009).

Setelah kepengurusan LPSTK terbentuk dan para pengurusnya telah mendapat berbagai pelatihan, kemudian dibentuk Pokmas di masing-masing desa. Pokmas ini pada dasarnya terdiri dari tiga, yaitu

Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pokmas Jender, dan Pokmas Konservasi. Pokmas Jender dibentuk untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Di Desa Gunung Kijang terdapat lima Pokmas UEP dan satu Pokmas Jender. Sedangkan, di Desa Malang Rapat terdapat empat Pokmas UEP dan sembilan Pokmas Jender. Semua Pokmas UEP dan Pokmas Jender tersebut mendapatkan bantuan dana dan peralatan untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif (MPA). Pembahasan mengenai kegiatan MPA yang dijalankan semua Pokmas UEP dan Pokmas Jender dapat dilihat pada bagian pembahasan *Kegiatan MPA (2.1)*.

Selain Pokmas UEP dan Pokmas Jender, untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang dibentuk kelompok pengawasan (Pokwasmas). Di kedua desa Pokwasmas dibentuk pada tahun 2007. Pengurus kelompok ini juga terdiri dari ketua, sekertaris dan anggota. Tugas Pokwasmas adalah melakukan kegiatan MCS, di antaranya, dengan melakukan patroli pengawasan di sekitar perairan desa, utamanya daerah perlindungan laut (DPL) dari kegiatan penangkapan *illegal* dengan menggunakan bahan beracun (bom dan potas). Untuk mendukung tugasnya masing-masing Pokwasmas diberi satu set sarana patroli, yaitu kapal (boat) dengan mesin 15 PK, sarana komunikasi *handy talky* (HT), teropong, dan GPS (Romdiati dan Djohan, 2009).



Gambar 2.2.

Lokasi DPL Desa Malang Rapat

(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Lokasi perairan yang dijadikan daerah perlindungan laut (DPL) Desa Malang Rapat adalah perairan sekitar Penyusuk (lihat Gambar 2.2). Sebagai tanda bahwa lokasi tersebut menjadi DPL Desa Malang Rapat, PIU COREMAP Kabupaten Bintan bersama LPSTK memasang *billboard* di pinggir pantai sekitar DPL (lihat Gambar 2.3). Penentuan DPL tersebut dilakukan melalui kegiatan CRITC-COREMAP pada tahun 2007 dengan melibatkan partisipasi masyarakat nelayan setempat (Romdiati dan Djohan, 2009). Pelibatan partisipasi masyarakat nelayan dalam penentuan DPL ternyata berdampak positif terhadap kesadaran nelayan untuk ikut serta melakukan kegiatan pengawasan DPL secara swadaya dan sukarela. Hal ini dibuktikan ketika kegiatan pengawasan DPL yang dilakukan Pokmaswas frekuensinya berkurang dan bahkan berhenti akibat tidak adanya dana operasional dan kerusakan kapal (*boat*) patroli, para

nelayan dengan sukarela tetap melakukan pengawasan untuk menjaga kelestarian DPL.



Gambar 2.3.
Billboard DPL Desa Malang Rapat
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

2.2. Kegiatan MPA

Salah satu bentuk program COREMAP II adalah pengembangan kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA). Pengembangan kegiatan MPA bertujuan meningkatkan/menambah pendapatan masyarakat pesisir dari kegiatan usaha selain kegiatan penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya laut lainnya sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut, termasuk ekosistem terumbu karang. Pengembangan kegiatan MPA disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan dilakukan dengan kaidah-kaidah usaha yang

ramah lingkungan. Dengan pengembangan kegiatan MPA ini, proses penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut lainnya secara berlebihan dengan alasan ekonomi diharapkan bisa berkurang/hilang sehingga sumber daya laut dan ekosistem terumbu karang akan terjaga kelestariannya.

Kegiatan yang bisa dijadikan MPA adalah seluruh kegiatan usaha, baik usaha baru maupun usaha lama, seperti usaha budidaya, pengolahan, pemasaran, dan usaha lainnya yang dapat memberikan penghasilan tambahan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Ide kegiatan MPA bisa berasal dari masyarakat maupun penawaran dari PIU COREMAP II. Ide yang dirasakan cocok serta sesuai dengan kondisi sumber daya lokal dan kemampuan kemudian dibuat proposal dan selanjutnya diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) melalui LPSTK kepada PIU COREMAP II. Selanjutnya, apabila disetujui, pokmas yang mengajukan kegiatan MPA akan diberikan bantuan oleh PIU COREMAP II melalui LPSTK. Bantuan yang diberikan bisa berupa pinjaman modal, pemberian alat dan perlengkapan, pemberian bibit atau benih, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengawasan, dan pemasaran (lihat Gambar 2.4). Jenis bantuan yang diberikan untuk setiap kegiatan MPA berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatan dan kesepakatan yang dibuat.

Pembahasan mengenai kegiatan MPA ini akan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai kelompok penerima bantuan dana MPA dan jenis pemanfaatannya. Kemudian, bagian kedua akan membahas perkembangan pokmas dan usaha yang dijalankannya. Pembahasan kedua bagian ini berdasarkan pada hasil survei terhadap rumah tangga penerima bantuan MPA serta hasil observasi, wawancara dengan berbagai narasumber, dan analisis isi terhadap Laporan Penyuluh COREMAP II Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.



Gambar 2.4.

**Salah Satu Pameran yang Diikuti PIU COREMAP Bintang
untuk Mempromosikan Produk-produk Pokmas**

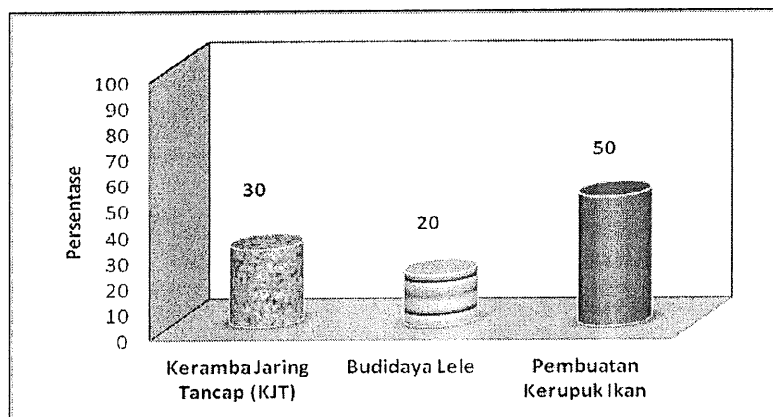
(Sumber: <http://regional.coremap.or.id/i/gallery/>)

- **Kelompok Penerima dan Jenis Pemanfaatan**

Di Desa Gunung Kijang dan Desa Malang Rapat, bantuan dan kegiatan MPA diterima oleh beberapa Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Pokmas Jender. Di Desa Gunung Kijang, kegiatan MPA dijalankan oleh lima Pokmas UEP dan satu Pokmas Jender. Sedangkan, di Desa Malang Rapat, kegiatan MPA dijalankan oleh empat Pokmas UEP dan sembilan Pokmas Jender. Bantuan dana MPA tersebut sebagian besar dimanfaatkan dimanfaatkan pada tiga kegiatan usaha utama, yaitu usaha keramba jaring apung (KJA)/keramba jaring tancap (KJT), usaha budidaya lele, dan usaha pembuatan kerupuk (lihat Diagram 2.1.)

Diagram 2.1.

Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Mata Pencapaian Alternatif (MPA) Menurut Kegiatan Usaha di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, 2011
(N 25)



Sumber: BME Sosial – Ekonomi COREMAP 2011.

Pada Diagram 2.1 terlihat 50 persen responden menyatakan memanfaatkan dana MPA untuk kegiatan usaha pembuatan kerupuk ikan. Sementara itu, sebanyak 30 persen responden memanfaatkannya untuk usaha KJT dan sisanya 20 persen responden memanfaatkannya untuk usaha budidaya lele. Dipilihnya usaha pembuatan kerupuk ikan sebagai kegiatan usaha MPA disebabkan kayanya potensi bahan baku ikan di daerah ini. Kelebihan lainnya adalah usaha pembuatan kerupuk ikan bisa dilakukan di rumah, tidak seperti KJT dan budidaya lele yang harus dilakukan di luar rumah. Selain itu, rendahnya risiko dari usaha pembuatan kerupuk ikan juga menjadi pertimbangan dalam memilih jenis usaha MPA.

Selain dimanfaatkan pada tiga kegiatan usaha utama, sebetulnya bantuan dana MPA juga dimanfaatkan untuk kegiatan usaha lain,

seperti usaha pembesaran kepiting bakau, wisata bahari, kerajinan lidi, pengolahan rumput laut, pembuatan ikan asin, pembuatan rempeyek kacang, dan pembuatan kue kering, pembuatan keripik ubi. Perincian pokmas yang menerima bantuan dana MPA dan jenis pemanfaatannya/usahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pokmas Penerima/Pelaksana dan Jenis Kegiatan MPA
di Desa Gunung Kijang dan Desa Malang Rapat

Pokmas Penerima/Pelaksana	Jenis Pemanfaatan/Usaha
<i>LPSTK Gunung Kijang</i>	
Pokmas Sotong Karang (UEP)	Pembesaran kepiting bakau
Pokmas Ikan Tembaku (UEP)	Pembesaran kepiting bakau
Pokmas Kuda Laut (UEP)	Pengembangan budidaya ikan karang di KJT
Pokmas Ketam Renjong (UEP)	Pengembangan budidaya ikan karang di KJT
Pokmas Truno Jaya (UEP)	Budidaya air tawar (budidaya lele)
Pokmas Agar-agar (Jender)	Pembuatan Kerupuk Ikan dan pengolahan rumput laut
<i>LPSTK Desa Malang Rapat</i>	
Pokmas Tenggiri (UEP)	Wisata bahari
Pokmas Ketam (UEP)	Pengembangan budidaya ikan karang di KJT
Pokmas Kerapu Hitam (UEP)	Pengembangan budidaya ikan karang di KJT
Pokmas Sembilang (UEP)	Budidaya air tawar (budidaya lele)
Pokmas Truno Tunggal (UEP)	Budidaya air tawar (budidaya lele)
Pokmas Ubur-ubur (Jender)	Kerajinan lidi dan pengolahan rumput laut
Pokmas Teripang (Jender)	Pengolahan ikan asin
Pokmas Penyu (Jender)	Pembuatan rempeyek kacang dan pembuatan kue kering
Pokmas Gemi (Jender)	Pembuatan keripik ubi
Pokmas Bandeng (Jender)	Pembuatan kerupuk ikan
Pokmas Silaturahmi (Jender)	Pembuatan kerupuk ikan
Pokmas Duyung (Jender)	Pembuatan kerupuk ikan
Pokmas Kenanga (Jender)	Pembuatan kerupuk ikan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan, 2011a

- **Perkembangan Usaha**

Gunung Kijang

Seperti yang terlihat pada Tabel 2.1., kegiatan MPA di Desa Gunung Kijang dimanfaatkan/dijalankan oleh empat Pokmas UEP, yaitu Pokmas Sotong Karang, Pokmas Ikan Tembakul, Pokmas Kuda Laut, Pokmas Ketam Renjong, Pokmas Truno Jaya, dan satu Pokmas Jender, yaitu Pokmas Agar-agar. Kegiatan MPA yang dijalankan, di antaranya, adalah pembesaran kepiting bakau, pembuatan kerupuk ikan, pengolahan rumput laut, pengembangan budidaya ikan karang di keramba jaring tancap (KJT), dan budidaya air tawar (budidaya lele). Penjelasan mengenai pokmas dan perkembangan MPA yang dijalankan akan disajikan pada bagian berikut ini.

Penjelasan yang pertama akan diawali dengan Pokmas Sotong Karang. Pokmas Sotong Karang merupakan pokmas yang memanfaatkan bantuan MPA untuk mengusahakan pembesaran kepiting bakau. Dengan bantuan yang diterima sebesar Rp 90.000.000,- pada tahun 2007, pokmas yang beranggotakan 10 orang ini mengusahakan pembesaran kepiting bakau di lahan hutan bakau Galang Batang dengan sistem pagar (*pen culture*)-menggunakan *nibung*. Banyaknya petak kandang yang digunakan pada usaha pembesaran kepiting bakau ini sebanyak enam petak kandang dengan luas total mencapai 882 m². Jumlah bibit yang disebar pada waktu itu sebanyak 3.400 ekor. Pada saat BME tahun 2011 dilakukan, status pokmas ini sudah tidak aktif lagi. Menurut laporan penyuluh, tidak aktifnya pokmas ini disebabkan permasalahan dalam manajemen pokmas. Modal usaha dan dana operasional yang diberikan habis tanpa laporan/pembukuan yang jelas sehingga usaha tidak bisa lagi dilanjutkan. Konstruksi pagar/lahan untuk pembesaran pun tidak dirawat dan dibiarkan lapuk sehingga tidak bisa digunakan oleh

kelompok lain. Selain Pokmas Sotong Karang, ada satu pokmas lagi yang mengusahakan MPA pembesaran kepiting bakau dengan sistem pagar (*pen culture*)-menggunakan nibung, yaitu Pokmas Ikan Tembakul. Pada saat BME ini dilakukan, pokmas ini baru melakukan penebaran 500 ekor bibit kepiting dari 2.000 ekor bibit kepiting yang dibutuhkan untuk memenuhi kapasitas pagar/lahan yang telah dibuat.

Selanjutnya adalah Pokmas Kuda Laut dan Pokmas Ketam Renjong. Kedua pokmas ini merupakan pokmas yang memanfaatkan dana kegiatan MPA untuk pengembangan budidaya/pembesaran ikan karang di keramba jaring tancap (KJT). Jenis ikan kerapu yang dibesarkan adalah ikan kerapu hitam. Dengan bantuan yang diterima, masing-masing, senilai Rp 85.000.000,- pada tahun 2008, keduanya membangun KJT di dua tempat yang berbeda. Masing-masing KJT terdiri dari 4 lubang dengan ukuran setiap lubang 4 x 4 m dan lebar pelantarnya 50 cm. Masing-masing KJT tersebut dapat diisi bibit ikan sebanyak 1.200 ekor. Selain itu, masing-masing KJT juga dilengkapi dengan rumah jaga 3 x 3 m yang berfungsi sebagai rumah tinggal penjaga KJT.

Dalam pelaksanaan usahanya, kedua pokmas yang masing-masing mempunyai anggota sebanyak 10 orang ini mengalami berbagai permasalahan. Pokmas Kuda Laut, misalnya, mengalami masalah dalam keaktifan anggota kelompok. Dari 10 orang anggota yang tercatat, ternyata hanya menyisakan 6 anggota yang aktif. Kondisi KJT-nya pun sudah mulai ada yang lapuk. Selain permasalahan tersebut, kedua kelompok juga belum mampu membuat pembukuan yang baik sehingga perkembangan usaha ini tidak bisa dipantau dengan baik. Meskipun mengalami berbagai permasalahan, kedua pokmas masih melakukan kegiatan dan ada hasilnya. Pokmas Kuda Laut, misalnya, telah berhasil melakukan panen sebanyak 33 kg dengan harga Rp 90.000,- per kg. Dari hasil panen tersebut, pokmas mendapatkan Rp 3.000.000,-. Sementara itu, selain memelihara ikan

kerapu hitam, Pokmas Ketam Renjong juga memanfaatkan KJT yang ada dengan memelihara ikan unggar dan ikan kerapu jenis lain yang bibitnya diperoleh dari tangkapan nelayan lokal. Kegigihan dan kreativitas Pokmas Ketam Renjong pun akhirnya berhasil membuahkan hasil yang dapat dinikmati anggotanya, meskipun nilainya tidak terlalu besar.

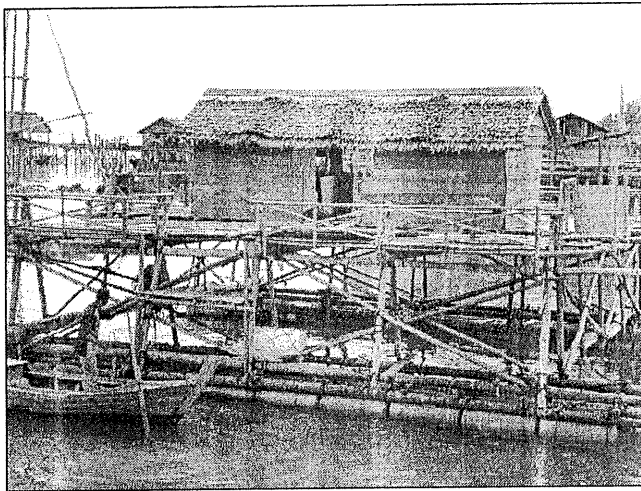
Berbeda dengan keempat pokmas sebelumnya yang melakukan usaha budidaya/pembesaran kepiting dan ikan kerapu yang merupakan biota air laut, pokmas yang satu ini memanfaatkan bantuan MPA dengan melakukan budidaya/pembesaran lele yang merupakan biota air tawar. Dengan bantuan dana Rp 50.000.000,- pada tahun 2010 dan didukung dengan pasokan air tawar yang cukup, Pokmas Truno Jaya memulai usaha dengan cara membuat kolam ikan serta membeli bibit dan pakan ikan. Usaha yang dilakukan Pokmas Truno Jaya ini bisa dikatakan cukup berhasil. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan pokmas memutarakan uang hasil panen sebelumnya untuk membeli bibit lele sebanyak 13.000 ekor dari Pekanbaru untuk budidaya berikutnya.

Pokmas yang terakhir adalah Pokmas Agar-agar merupakan satu-satunya Pokmas Jender yang ada di Desa Gunung Kijang. Pada tahun 2007, pokmas yang beranggotakan 10 orang ini mendapatkan bantuan modal usaha, pelatihan, peralatan, dan bahan untuk kegiatan pembuatan kerupuk ikan dan pengolahan rumput laut. Meskipun bantuan yang diberikan cukup lengkap, namun dalam kenyataannya pokmas ini tidak melakukan kegiatan dengan optimal. Menurut laporan penyuluh, hal ini disebabkan kesibukan ketua dan anggota pokmas sehingga tidak ada waktu untuk menjalankan pokmas.

Malang Rapat

Berbeda dengan jumlah pokmas di Desa Gunung Kijang yang hanya 6 buah, jumlah pokmas di Desa Malang Rapat dua kali lebih banyak, yaitu sebanyak 13 buah. Perbedaan lainnya adalah komposisi antara jumlah Pokmas Jender dengan jumlah Pokmas UEP di mana jumlah Pokmas Jender sebanyak 8 buah, lebih banyak daripada jumlah Pokmas UEP yang hanya 5 buah. Pokmas yang masuk ke dalam kategori Pokmas UEP adalah Pokmas Tenggiri, Pokmas Ketam, Pokmas Ikan Kerapu Hitam, Pokmas Sembilang, dan Pokmas Truno Tunggal. Sementara itu, pokmas yang masuk ke dalam kategori Pokmas Jender adalah Pokmas Ubur-ubur, Pokmas Teripang, Pokmas Bandeng, Pokmas Silaturahmi, Pokmas Duyung, Pokmas Kenanga, Pokmas Gemi, dan Pokmas Penyu. Dibandingkan dengan Desa Gunung Kijang, pembentukan pokmas di Desa Malang Rapat baru dimulai pada tahun 2008 untuk Pokmas Jender dan tahun 2009 untuk Pokmas UEP.

Pokmas Tenggiri merupakan salah satu pokmas UEP pertama yang diberikan bantuan dana MPA. Bantuan dana yang diterima pada tahun 2009 tersebut digunakan untuk membangun sarana usaha wisata bahari. Sarana wisata bahari tersebut berupa kelong apung yang dapat difungsikan sebagai sarana pemancingan di tengah laut (lihat Gambar 2.5.). Meskipun usaha wisata bahari ini direncanakan sebaik mungkin dengan menempatkan *kelong* apung di lokasi yang banyak dikunjungi pemancing dan wisatawan pada hari Minggu dan hari libur lainnya, namun dalam pelaksanaannya usaha ini tidak berjalan dengan baik. Saat ini, kondisi *kelong* apung sudah lapuk, beberapa peralatan seperti drum dan mesin genset pun hilang tak jelas rimbanya.

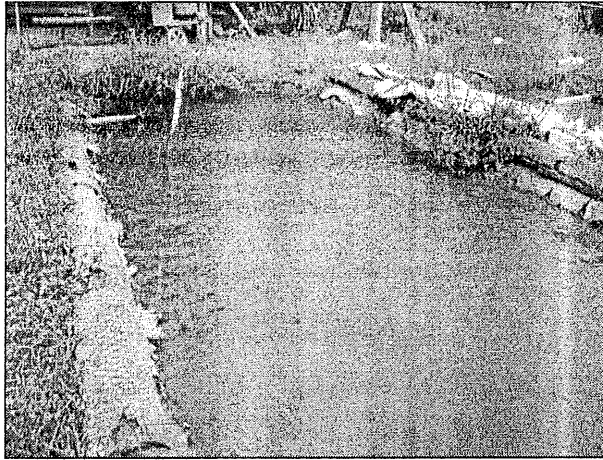


Gambar 2.5.

Kelongs Apung Wisata Bahari-Pokmas Tenggara

(Sumber: <http://regional.coremap.or.id/i/gallery/>)

Selanjutnya adalah Pokmas Ketam dan Pokmas Ikan Kerapu Hitam. Kedua pokmas yang didirikan pada tahun 2009 ini menjalankan usaha yang sama, yaitu usaha pengembangan budidaya ikan karang di KJT. Pada awal-awal pelaksanaan, KJT Ikan Kerapu Hitam sempat berhasil dan menuai keuntungan. Hasil panen KJT Ikan Kerapu dibagikan kepada anggota kira-kira sebesar 45 persen dan sisanya 55 persen digunakan untuk pengembangan usaha berikutnya. Dana sebesar 55 persen tersebut digunakan untuk pembelian bibit, perawatan alat, kas, kelompok, dan honor LPSTK sebesar 5 persen. Namun, dalam perkembangannya seiring dengan kerusakan konstruksi KJT yang lapuk dan pengunduran diri beberapa anggota yang kecewa, usaha akhirnya berhenti dan sampai saat ini belum dilanjutkan lagi.



Gambar 2.6.
Kolam Ikan Lele Bantuan COREMAP-Pokmas Truno Tunggal
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

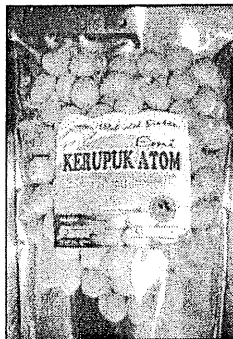
Kemudian, dua pokmas UEP terakhir adalah Pokmas Sembilang dan Pokmas Truno Tunggal. Persamaan kedua pokmas ini adalah sama-sama melakukan kegiatan MPA budidaya/pembesaran ikan lele. Perbedaannya, usaha Pokmas Sembilang dilakukan mulai tahun 2009, sedangkan usaha Pokmas Truno Tunggal dilakukan mulai tahun 2010. Pada saat BME tahun 2011 dilakukan, Pokmas Sembilang sudah tidak melakukan aktivitas lagi dengan alasan dana operasional habis. Kondisi berbeda terjadi pada Pokmas Truno Tunggal yang masih melakukan aktivitas usahanya di 6 kolam berlapis terpal ukuran 2 x 6 meter (lihat Gambar 2.6.). Pada bulan April 2011, pokmas yang mendapatkan bantuan modal usaha Rp 50.000.000,- ini berhasil melakukan panen sebanyak 40 kg dengan harga jual Rp 14.000,-/kg. Meskipun bisa dikatakan berhasil melakukan panen, anggota pokmas masih mengeluhkan harga pakan/pelet yang semakin naik sehingga keuntungan yang diperoleh semakin kecil, bahkan apabila kondisi ini terus terjadi, usahanya dikhawatirkan akan merugi.

Pembahasan Pokmas Jender akan dimulai dengan pembahasan Pokmas Ubur-ubur yang merupakan Pokmas Jender pertama yang mendapatkan bantuan dana MPA pada tahun 2008. Bantuan dana MPA yang diterima sebanyak dua paket, untuk dua jenis usaha yang berbeda, yaitu kerajinan lidi dan pengolahan rumput laut. Selain berbentuk modal usaha, bantuan yang diterima juga berbentuk bantuan peralatan dan bahan-bahan produksi. Selain mendapatkan bantuan dana MPA dari Coremap, pokmas yang beranggotakan 10 orang ini juga mendapatkan bantuan dana Program KUBE dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Keunggulan lain dari pokmas ini adalah sudah dimilikinya izin dari POM-Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Izin ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan penjual terhadap produk dodol rumput laut yang diproduksi pokmas. Dodol rumput laut yang diproduksi se jauh ini telah merambah pasar swalayan dan selalu hadir di setiap even resmi yang diadakan Pemerintah Kabupaten Bintan. Kesuksesan yang dicapai pokmas ternyata tidak bisa bertahan lama. Menurut informasi dari narasumber, kecurigaan di antara bendahara dan anggota kepada ketua dalam pengelolaan uang, telah menghancurkan keaktifan dan kekompakan pokmas. Kondisi ini membuat produksi dodol rumput sejak bulan April 2011 hanya dikendalikan oleh ketua pokmas sehingga hasilnya tidak optimal.

Berikutnya adalah pembahasan Pokmas Teripang. Pokmas yang beranggotakan 10 orang ini memanfaatkan bantuan dana MPA tahun anggaran 2010 sebesar Rp 4.000.000,- untuk kegiatan pengolahan ikan asin. Namun, seringkali pokmas ini mengalami kesulitan memperoleh bahan baku ikan, membuat pokmas ini melakukan kegiatan produksi yang lain selain pengolahan ikan segar menjadi ikan asin. Produk yang dipilih adalah keripik ubi dan kue bawang. Pemasaran dilakukan dengan menjual produknya ke warung-warung sekitar dengan harga Rp 800,-/bungkus. Oleh warung, produknya dijual kembali ke konsumen dengan harga Rp 1.000,-/bungkus.

Keuntungan yang diperoleh kemudian digunakan untuk membayar angsuran bantuan dana MPA ke LPSTK sebesar Rp 97.000,-/bulan.

Keberhasilan produksi dan pemasaran juga terjadi pada Pokmas Penyu dan Pokmas Gemi. Dengan bantuan dana MPA Rp 4.000.000 tahun 2010, Pokmas Penyu yang beranggotakan 5 orang berhasil memproduksi peyek 5 kg/bulan dan memasarkannya di warung-warung terdekat. Sementara itu, bantuan dana MPA Rp 5.000.000 tahun 2010, Pokmas Penyu yang beranggotakan 8 orang berhasil memproduksi keripik ubi 5 kg/bulan dan memasarkannya di warung-warung terdekat. Keuntungan hasil penjualan digunakan untuk membayar angsuran bantuan dana MPA ke LPSTK sebesar Rp 200.000,-/bulan. Sebagian lagi digunakan untuk modal produksi berikutnya dan kalau masih ada sisa dibagikan kepada anggota.



Gambar 2.7.

Kerupuk Ikan Pokmas Bandeng dengan Merek Kerupuk “Atom”
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Pembahasan yang selanjutnya adalah Pokmas Bandeng, Silaturahmi, Duyung dan Kenanga yang sama-sama memanfaatkan bantuan dana MPA untuk kegiatan pembuatan kerupuk ikan. Meskipun sama-sama melakukan usaha pembuatan kerupuk ikan,

jenis ikan bahan baku dan hasil kerupuk ikan yang dibuat berbeda-beda sehingga perkembangannya pun berbeda.



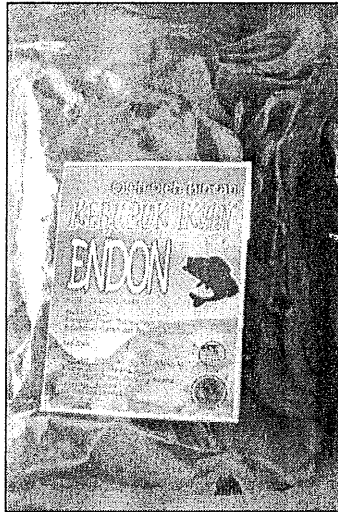
Gambar 2.8.

Proses Pembuatan Kerupuk Ikan Pokmas Bandeng

(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Pokmas Bandeng yang mendapatkan bantuan peralatan dan dana operasional MPA Rp 3.000.000 pada tahun 2010 memanfaatkannya untuk memproduksi kerupuk atom dengan baku ikan bandeng. Dengan keaktifan dan kekompakkan 10 orang anggotanya, pokmas ini mampu memproduksi kerupuk katom sampai dengan 100 kg/bulan dengan omset Rp 5.000.000,-. Produksi dan pemasaran dilakukan di rumah ketua pokmas. Selain dipasarkan di rumah ketua pokmas, pemasaran juga dilakukan di warung-warung sekitar serta rumah makan dan pasar swalayan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Selain dari rasanya yang enak, keberhasilan produk yang diberi merek Kerupuk Atom ini diterima di pasar juga disebabkan oleh kemasan yang menarik. Keuntungan hasil penjualan digunakan untuk membayar angsuran bantuan dana MPA ke LPSTK sebesar Rp 200.000,-/bulan. Sebagian lagi digunakan untuk modal produksi berikutnya dan sisanya dibagikan kepada anggota. Produk

kerupuk ikan Pokmas Bandeng yang sudah dikemas dengan merek kerupuk “atom” dapat dilihat pada Gambar 2.7. Sementara itu, proses pembuatan kerupuk ikan Pokmas Bandeng dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.9.

Kerupuk Ikan Pokmas Silaturahmi dengan Merek Kerupuk “Endon”
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Pokmas Silaturahmi juga merupakan salah satu pokmas pembuat kerupuk ikan yang masih kontinyu berproduksi. Dengan bantuan peralatan dan dana operasional MPA sebesar Rp 9.500.000,- pada tahun 2010, pokmas ini memproduksi kerupuk ikan dengan bahan baku ikan tamban yang suplai-nya cukup melimpah sepanjang tahun. Meskipun bahan baku cukup melimpah, produksi kerupuk pokmas ini masih terbatas 10 kg/bulan akibat masih terbatasnya pangsa pasar. Jaringan pemasaran yang hanya sampai di warung-warung sekitar Desa Malang Rapat, membuat pangsa pasarnya juga

terbatas. Upaya yang dilakukan untuk mendongkrak penjualan dan memperluas pasar di antaranya dengan meningkatkan kualitas dan pembuatan kemasan yang lebih menarik. Sama dengan pokmas jender lainnya, keuntungan hasil penjualan digunakan untuk membayar angsuran bantuan dana MPA ke LPSTK sebesar Rp 200.000,-/bulan. Sebagian lagi digunakan untuk modal produksi berikutnya dan kalau masih ada sisa dibagikan kepada anggota. Produk kerupuk ikan Pokmas Silaturahmi yang sudah dikemas dengan merek “Endon” dapat dilihat pada Gambar 2.9. Sedangkan, proses pembuatan kerupuk ikan Pokmas Silaturahmi dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10.
Proses Pembuatan Kerupuk Ikan Pokmas Silaturahmi
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

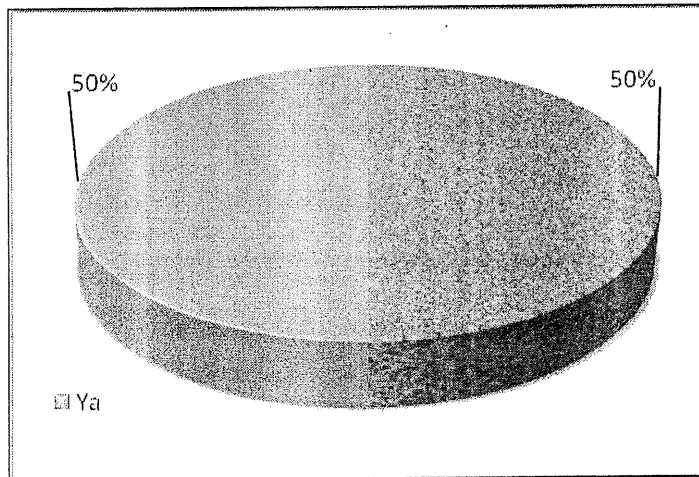
Kondisi yang hampir sama dengan Pokmas Silaturahmi, terjadi pada Pokmas Kenanga. Dengan bantuan peralatan dan dana operasional Rp 8.000.000,- pada tahun 2010, pokmas ini baru mampu memproduksi kerupuk ikan dari ikan parang sebanyak 5 kg/bulan. Terbatasnya pangsa pasar dan jaringan pasar merupakan permasalahan

utama meningkatkan penjualan kerupuk ikan hasil produksi. Namun, meskipun penjualannya masih terbatas, ternyata pokmas ini masih mampu membayar angsuran bantuan dana MPA ke LPSTK sebesar Rp 200.000,-/bulan.

Kondisi berbeda dialami oleh Pokmas Duyung. Alasan kesulitan bahan baku dan kesibukan anggota membuat pokmas ini tidak lagi melakukan produksi pembuatan kerupuk ikan. Kondisi ini berujung pada ketidakmampuan pokmas membayar angsuran bantuan dana MPA ke LPSTK.

- **Pengaruh Kegiatan MPA dalam Peningkatan Pendapatan**

Diagram 2.2.
Pengaruh Kegiatan MPA dalam Peningkatan Pendapatan
Rumah Tangga Anggota Pokmas



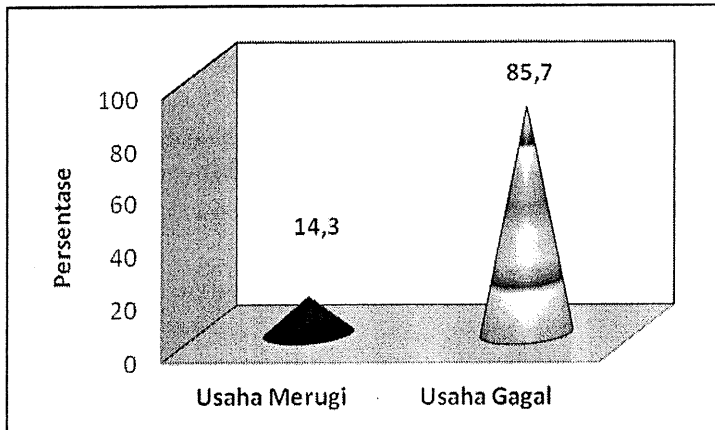
Sumber: BME Sosial – Ekonomi COREMAP 2011.

Perkembangan usaha/kegiatan MPA yang terjadi di Desa Gunung Kijang dan Desa Malang Rapat sedikit banyak memberikan

pengaruh bagi peningkatan pendapatan rumah tangga responden yang menjadi anggota pokmas (lihat Diagram 2.2.). Pada Diagram 2.2. terlihat separuh (50 persen) dari responden menyatakan bahwa kegiatan MPA yang dijalankan mereka telah berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangga, namun sisanya menyatakan tidak berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Diagram 2.3.

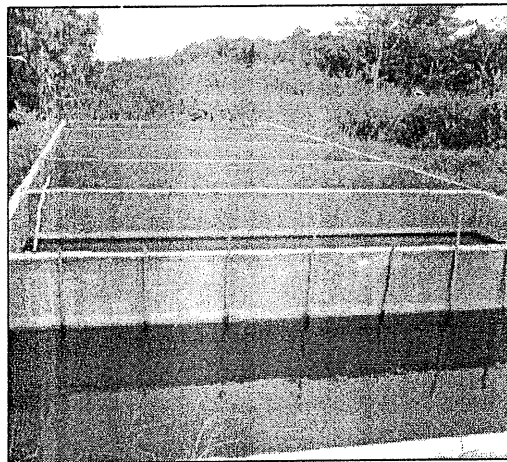
Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Mata Pencapaian Alternatif (MPA) Menurut Alasan Pendapatan Tidak Meningkat



Sumber: BME Sosial – Ekonomi COREMAP 2011.

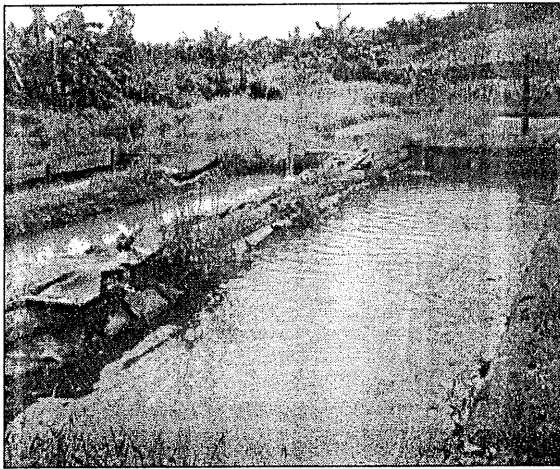
Menurut responden, tidak berhasilnya kegiatan MPA meningkatkan pendapatan rumah tangga disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sebanyak 85,7 persen responden menyatakan bahwa usaha MPA yang mereka jalankan gagal dan kedua sebanyak, 14,3 persen menyatakan bahwa alasannya adalah usaha MPA yang mereka jalankan merugi (lihat Diagram 2.3.). Cukup menarik untuk dicermati adalah meskipun usaha MPA yang mereka jalankan gagal dan merugi, namun tidak ada satu pun yang mengganti jenis usaha

Selain dengan bantuan dana dan peralatan usaha, kelancaran berbagai usaha MPA seharusnya bisa didukung oleh fasilitas sarana fisik yang dibangun oleh PIU COREMAP dan diberikan kepada setiap LPSTK untuk dikelola dan dimanfaatkan. Pokmas-pokmas di Desa Malang Rapat, misalnya, seharusnya bisa memanfaatkan Pondok Informasi COREMAP dan Bangsal Kerja COREMAP yang telah ada. Keberadaannya yang berada di pinggir jalan raya bisa dijadikan sebagai *showroom*/toko untuk memasarkan produk yang dihasilkan sekaligus sebagai pusat informasi dan promosi mengenai kegiatan usaha mereka. Namun, sayang sampai saat ini, Pondok Informasi COREMAP dan Bangsal Kerja COREMAP tersebut sampai saat ini hanya dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan dengan optimal. Sementara, di sisi lain, sebagian besar pokmas masih mengeluhkan susahnyanya memasarkan produk hasil usaha dan terbatasnya jaringan pemasaran yang dimiliki. Pembahasan mengenai sarana fisik dibahas pada bagian selanjutnya (2.3.).



Gambar 2.11.
Kolam Lele Pokmas Truno Tunggal-Bantuan KUBE
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Selain itu, untuk menambah modal dan meningkatkan kapasitas usaha seharusnya seluruh pokmas bisa memanfaatkan program pemerintah lainnya yang masuk ke desa mereka seperti yang dilakukan oleh Pokmas Ubur-ubur dan Pokmas Truno Tunggal. Kedua pokmas tersebut berhasil memanfaatkan bantuan dari Program KUBE untuk meningkatkan kapasitas usaha yang telah ada. Pada Gambar 2.11. terlihat kolam lele Pokmas Truno Tunggal yang dibangun memanfaatkan bantuan dari Program KUBE untuk meningkatkan kapasitas budidaya lele yang awalnya diprakarsai oleh bantuan COREMAP (lihat juga Gambar 2.12.)



Gambar 2.12.
Kolam Lele Pokmas Truno Tunggal-Bantuan COREMAP
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

2.3. Pembangunan Sarana Fisik Desa

Pembangunan sarana fisik desa merupakan salah satu jenis bantuan yang diberikan COREMAP kepada setiap desa yang menjadi lokasi COREMAP. Pembangunan sarana fisik desa bertujuan untuk

mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan COREMAP lainnya sehingga tujuan COREMAP dapat tercapai dengan baik dan lebih cepat. Jenis sarana fisik yang dibangun ada yang bersifat umum berdasarkan penawaran dari PIU COREMAP dan ada juga yang bersifat spesifik berdasarkan kebutuhan desa (lihat Tabel 2.2.). Sarana fisik yang bersifat umum contohnya adalah pondok Informasi dan tambatan perahu. Kedua sarana fisik ini ada di setiap desa yang menjadi lokasi COREMAP di Kabupaten Bintan, termasuk di Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang. Sedangkan, sarana fisik yang bersifat spesifik contohnya adalah sarana air bersih di Desa Gunung Kijang. Jenis sarana fisik ini menyesuaikan dengan kebutuhan desa. Desa Gunung Kijang dibangun sarana air bersih karena sebagian masyarakatnya memang kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sebagian besar konstruksi sarana fisik tersebut dibangun oleh kontraktor yang ditunjuk atau kontraktor pemenang tender. Partisipasi masyarakat dan pihak desa hanyalah sebatas penyediaan lahan tempat sarana fisik tersebut, kecuali pembangunan pondok informasi di kedua desa yang dibantu oleh masyarakat melalui mekanisme *community contract* yang dilakukan PIU COREMAP Kabupaten Bintan dengan LPSTK Desa Malang Rapat dan LPSTK Desa Gunung Kijang. Kelemahan dari tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan konstruksi sarana fisik adalah (i) tidak adanya kontrol masyarakat dalam proses pembangunan serta (ii) kurangnya kepedulian dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sarana tersebut. Selain itu, beberapa lahan yang disediakan oleh masyarakat dan pihak desa ada yang lokasinya tidak tepat dengan kebutuhan/tujuan pembangunan sarana fisik tersebut. Pembahasan yang lebih detail mengenai pembangunan sarana fisik akan dibahas satu per satu pada paragraf-paragraf berikutnya.

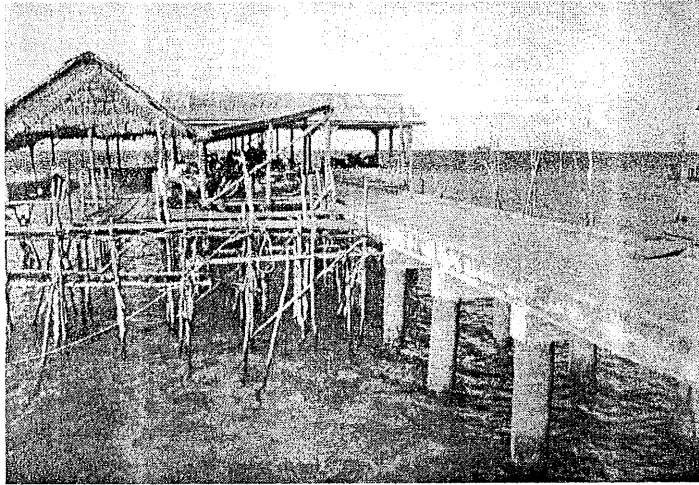
Tabel 2.2.
Sarana Fisik Bantuan COREMAP
di Desa Gunung Kijang dan Desa Malang Rapat

Nama Sarana Fisik	Desa	
	Malang Rapat	Gunung Kijang
Tambatan Perahu	v	v
Bangsai Kerja dan Ruang Promosi	v	.
Pondok Informasi	v	v
Sarana MCK	v	v
Tempat Pembuangan Sampah		v
Sarana Air Bersih		v
Pengerasan Jalan		v

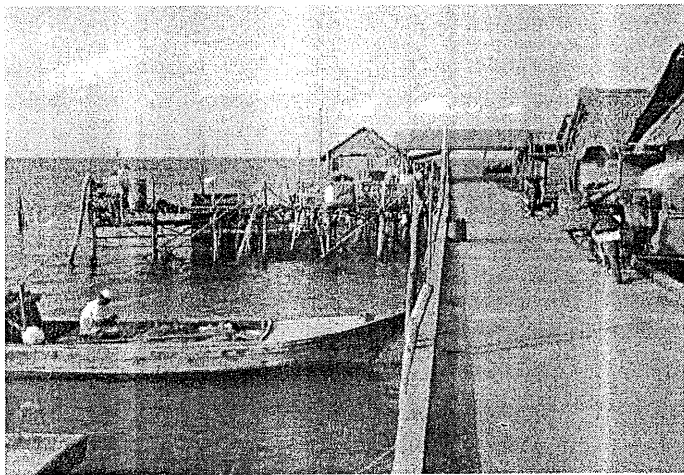
Sumber: (i) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan, 2011b;
(ii) observasi; dan (iii) hasil wawancara

- Tambatan Perahu

Tambatan perahu merupakan salah satu sarana fisik yang dibangun di kedua desa. Fungsi sarana fisik ini adalah sebagai tempat sandar dan menambatkan perahu nelayan atau bisa dikatakan sebagai dermaga atau pelabuhan kecil nelayan. Meskipun fungsi awalnya untuk tempat sandar dan menambatkan perahu, namun dalam perkembangannya, di Desa Malang Rapat, sarana fisik ini digunakan juga sebagai tempat parkir motor nelayan dan rumah singgah/gudang nelayan. Bahkan, tak jarang, tambatan perahu Desa Malang Rapat yang terletak di pinggir Jalan Raya Tanjung Pinang-Pantai Trikora ini didatangi langsung oleh para tengkulak untuk melakukan transaksi jual beli hasil tangkapan nelayan. Pada Gambar 2.13 terlihat kondisi tambatan perahu Desa Malang Rapat yang juga difungsikan sebagai tempat parkir motor para nelayan. Sementara itu, pada Gambar 2.14 terlihat di kanan-kiri tambatan perahu dibangun rumah singgah dan gudang nelayan.



Gambar 2.13.
Tambatan Perahu Desa Malang Rapat
 (Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)



Gambar 2.14.
Tambatan Perahu Desa Malang Rapat
 (Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Di Desa Gunung Kijang, meskipun letaknya tidak se-strategis tambatan perahu Desa Malang Rapat yang berada di pinggir Jalan Raya Tanjung Pinang-Pantai Trikora yang mudah diakses oleh tengkulak maupun pembeli langsung, tambatan perahu Desa Gunung Kijang pun dirasakan sangat membantu para nelayan untuk menambatkan perahunya. Pembangunan jalan dari jalan raya menuju tambatan perahu yang berada di perkampungan nelayan Desa Gunung Kijang ini pun terus dilakukan pemerintah daerah untuk semakin mempermudah akses para tengkulak maupun pembeli langsung terhadap hasil tangkapan nelayan Desa Gunung Kijang. Pada Gambar 2.15. terlihat suasana di sekitar tambatan perahu Desa Gunung Kijang yang masih sepi.



Gambar 2.15.

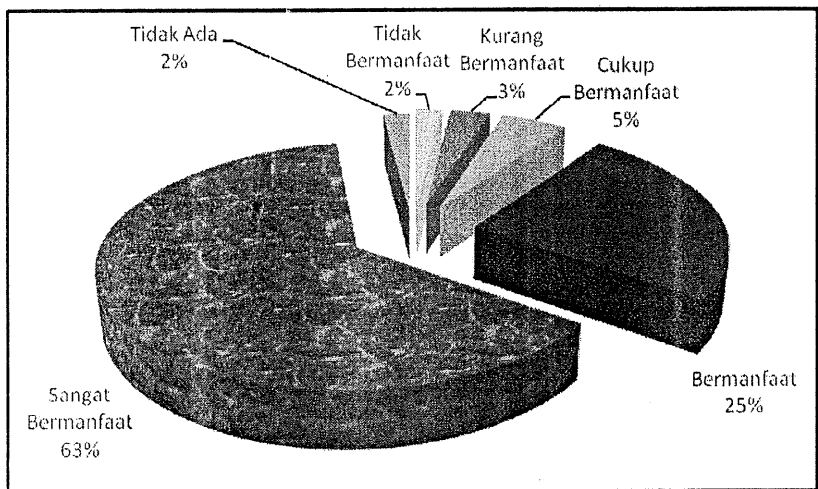
Tambatan Perahu Desa Gunung Kijang

(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Bagi para nelayan dan masyarakat kedua desa, tambatan perahu yang dibangun pada tahun 2007 dan kemudian ditingkatkan lagi pada tahun 2009 memberikan manfaat yang sangat besar. Pada Diagram

2.4. terlihat sebanyak 63 persen responden menyatakan pembangunan tambatan perahu sangat bermanfaat, 25 persen menyatakan bermanfaat, dan 5 persen menyatakan cukup bermanfaat. Hanya 3 persen dan 2 persen saja yang menyatakan kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Jumlah persentase tersebut semakin mempertegas bahwa tambatan perahu tersebut memang sangat bermanfaat bagi masyarakat kedua desa, terutama para nelayan.

Diagram 2.4.
Pendapat Responden tentang
Manfaat Pembangunan Tambatan Perahu



Sumber: BME Sosial – Ekonomi COREMAP 2011

- **Bangsai Kerja dan Ruang Promosi**

Bangsai kerja dan ruang promosi merupakan salah satu sarana fisik yang ada di Desa Malang Rapat, namun tidak ada di Desa Gunung Kijang. Sarana fisik ini dibangun pada tahun 2008 oleh

kontraktor di atas lahan yang disediakan masyarakat dan pihak desa dalam bentuk gedung permanen. Sesuai namanya, seharusnya sarana fisik ini dapat difungsikan sebagai tempat *workshop* dan promosi hasil-hasil kegiatan MPA yang dijalankan pokmas-pokmas yang berada di bawah naungan LPSTK Desa Malang Rapat. Namun dalam kenyataannya, sejak serah terima 23 Februari 2009 (No. 523/COREMAP II/BÂ/II/2009/32) sampai dengan BME Sosek 2011 dilakukan, sarana fisik ini tidak dimanfaatkan dengan optimal. Pada Gambar 2.16. terlihat kondisi gedung bangsal kerja dan ruang promosi yang kosong dan tidak ada aktivitas sebagai tanda bahwa sarana fisik ini tidak dimanfaatkan.



Gambar 2.16.

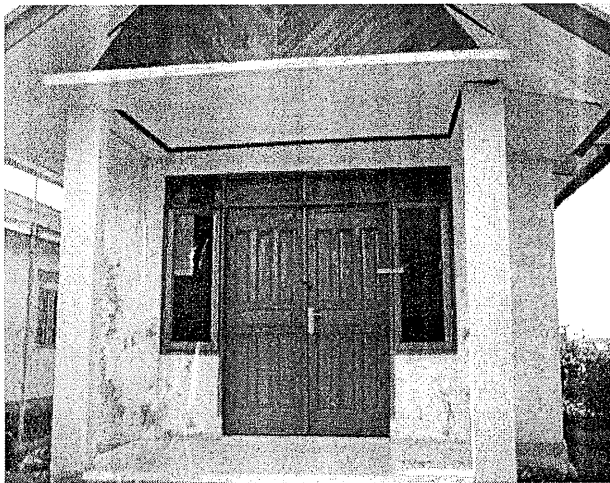
Bangsal Kerja dan Ruang Promosi LPSTK Desa Malang Rapat

(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber dan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan (2011b), tidak optimalnya pemanfaatan sarana fisik ini disebabkan oleh

ketidakmampuan dan ketidakmauan LPSTK dan Pokmas memanfaatkan/mengelola sarana fisik yang telah dibangun secara permanen ini. Padahal, di sisi lain, sebagian besar pokmas yang melakukan kegiatan MPA mengeluhkan keterbatasan akses untuk melakukan pemasaran hasil produksinya. Ke depan, LPSTK, pokmas, pihak desa, dan PIU COREMAP harus berkoordinasi untuk mengatur pemanfaatan/pengelolaan sarana fisik yang letaknya cukup strategis, yaitu berada di pinggir Jalan Raya Tanjung Pinang-Pantai Trikora yang banyak dilalui oleh para wisatawan.

- **Pondok Informasi**



Gambar 2.17.
Pondok Informasi LPSTK Desa Malang Rapat
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Pondok Informasi merupakan salah satu sarana fisik yang terdapat di kedua desa. Sarana fisik ini dibangun pada tahun 2009 di atas lahan yang disediakan masyarakat dan pihak desa. Berbeda dengan sarana fisik lainnya, selain menyediakan lahan, masyarakat juga

terlibat dalam pembangunan konstruksi pondok informasi melalui mekanisme *community contract*. Serah terima pondok informasi kepada masing-masing LPSTK dilakukan pada tanggal 5 Januari 2010 melalui surat serah terima dengan nomor 523/COREMAP II/BA/I/2010/82 untuk pondok informasi Desa Malang Rapat dan nomor 523/COREMAP II/BA/I/2010/79 untuk pondok informasi Desa Gunung Kijang (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan, 2011b).

Sesuai dengan namanya, pondok informasi seharusnya dijadikan pusat informasi mengenai kegiatan COREMAP sekaligus sebagai kantor atau sekretariat LPSTK. Namun dalam kenyataannya, pondok informasi di Desa Malang Rapat tidak pernah dimanfaatkan dengan baik. Bahkan, sejak terpilih, pengurus LPSTK periode kedua belum pernah memanfaatkannya sama sekali. Pada Gambar 2.17. terlihat kondisi pondok informasi di Desa Malang Rapat yang kosong dan terkunci sebagai tanda bahwa sarana fisik ini tidak dimanfaatkan. Bahkan, di pondok informasi tersebut tidak ada papan nama ataupun keterangan yang menerangkan bahwa bangunan tersebut adalah pondok informasi COREMAP-LPSTK Desa Malang Rapat.

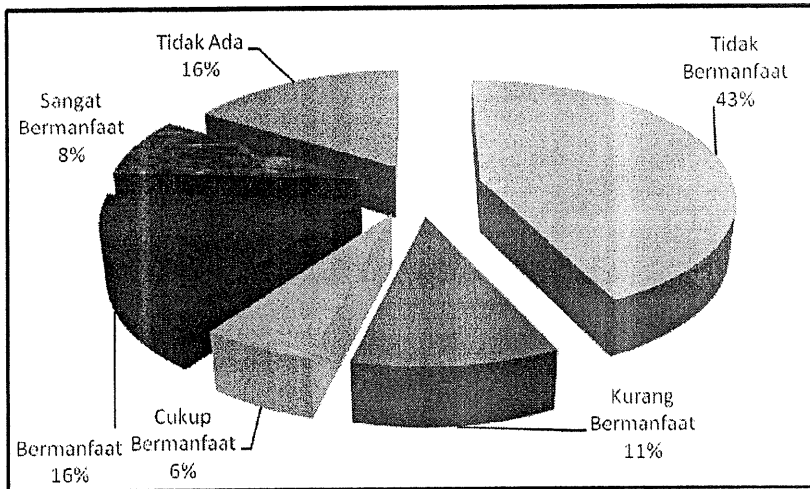
Berbeda dengan di Desa Malang Rapat, pemanfaatan pondok informasi di Desa Gunung Kijang relatif lebih baik. Meskipun belum bisa dikatakan optimal, pondok informasi sudah dicoba untuk dimanfaatkan sebagai pusat informasi COREMAP sekaligus kantor/sekretariat LPSTK. Pada Gambar 2.18. terlihat kondisi pondok informasi di Desa Gunung Kijang yang dimanfaatkan sebagai pusat informasi kegiatan COREMAP sekaligus kantor/sekretariat LPSTK. Pada dinding juga terlihat ada tulisan yang menerangkan bahwa bangunan tersebut adalah pondok informasi COREMAP Desa Gunung Kijang.



Gambar 2.18.
Pondok Informasi LPSTK Desa Gunung Kijang
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Tidak optimalnya pemanfaatan pondok informasi, terutama di Desa Malang Rapat dirasakan oleh para responden. Pada Diagram 2.5. terlihat sebagian besar (43 persen) responden menyatakan pondok informasi tidak bermanfaat dan 11 persen menyatakan kurang bermanfaat. Sedangkan responden yang menyatakan sangat bermanfaat hanya 8 persen, ditambah 16 persen menyatakan bermanfaat, dan 6 persen cukup bermanfaat. Yang menarik lagi adalah cukup banyaknya responden yang tidak tahu adanya pondok informasi, yaitu sebesar 16 persen. Padahal, pondok informasi dibangun pada tahun 2009 dengan melibatkan masyarakat. Untuk responden di Desa Malang Rapat, tidak adanya papan nama di pondok informasi Desa Malang Rapat menyebabkan banyak responden yang tidak tahu bahwa gedung yang berada di Jalan Raya Tanjung Pinang-Pantai Trikora tersebut adalah pondok informasi.

Diagram 2.5.
Pendapat Responden tentang
Manfaat Pembangunan Pondok Informasi



Sumber: BME Sosial – Ekonomi COREMAP 2011

- **Sarana MCK dan Tempat Sampah**

Selain membangun sarana fisik yang bertujuan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, seperti tambatan perahu serta bangsal kerja dan ruang promosi, COREMAP juga membangun sarana fisik yang mendukung peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat, seperti sarana mandi cuci kakus (MCK) dan tempat sampah. MCK dibangun di kedua desa pada tahun 2009 dan diserahterimakan pada tanggal 5 Januari 2010 melalui surat no 523/COREMAP II/BA/I/2010/67 untuk Desa Malang Rapat dan no 523/COREMAP II/BA/I/2010/64 untuk Desa Gunung Kijang. Sama dengan kebanyakan sarana fisik lainnya, pembangunan sarana MCK dilakukan oleh kontraktor di lahan yang disediakan masyarakat dan pihak desa (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan, 2011b).



Gambar 2.19.
Tempat Sampah Desa Gunung Kijang
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Untuk pembangunan tempat sampah hanya dilakukan di Desa Gunung Kijang, tepatnya berada di belakang Kantor Gunung Kijang, meskipun pada saat BME Sosek 2011 sudah tidak dimanfaatkan dengan baik lagi (lihat Gambar 2.19.). Selain tempat sampah yang bersifat permanen, COREMAP juga memberikan bantuan tempat sampah yang bersifat *portable*, yaitu tong sampah (lihat Gambar 2.20.). Tong sampah tersebut diberikan kepada rumah tangga yang terpilih. Tong sampah tersebut ditandai dengan tulisan COREMAP sehingga selain berfungsi sebagai tempat sampah, tulisan tersebut bisa mengingatkan bahwa di Desa Gunung Kijang ada program COREMAP (salah satu *public awareness*).



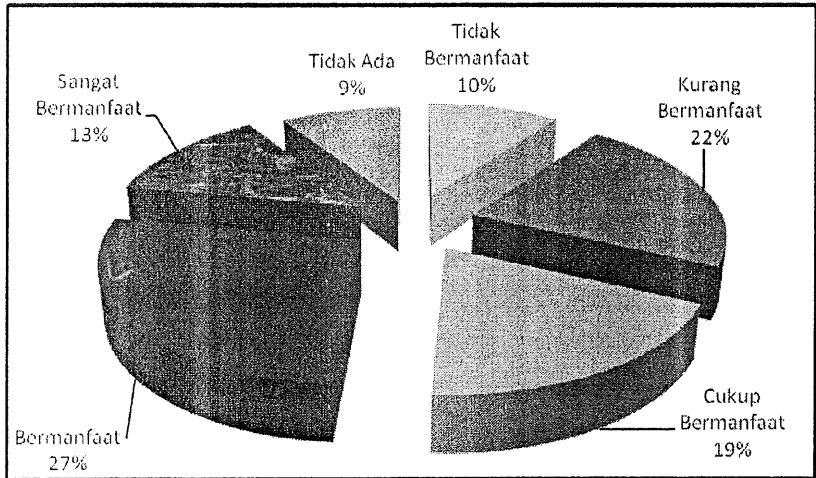
Gambar 2.20.

Tong Sampah Desa Gunung Kijang

(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Keberadaan MCK di kedua desa dan tempat sampah di Desa Gunung Kijang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk para responden. Pada Diagram 2.6. terlihat sebanyak 13 persen responden menyatakan pembangunan MCK dan tempat sampah sangat bermanfaat, sebanyak 27 persen menyatakan bermanfaat, dan sebanyak 19 persen menyatakan cukup bermanfaat. Sementara itu, responden yang menyatakan kurang dan tidak bermanfaat, masing-masing sebanyak 22 persen dan 10 persen.

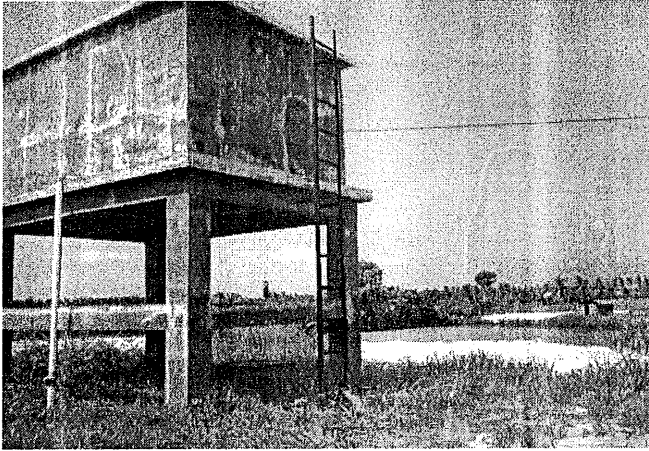
Diagram 2.6.
Pendapat Responden tentang
Manfaat Pembangunan MCK dan Tempat Sampah



Sumber: BME Sosial – Ekonomi COREMAP 2011

- **Sarana Air Bersih**

Sarana air bersih merupakan sarana fisik yang dibangun secara khusus di Desa Gunung Kijang. Sarana air bersih yang dibangun berupa bak penampungan air permanen yang dilengkapi dengan pompa untuk menyedot air dan mengalirkannya ke MCK COREMAP dan beberapa MCK umum lainnya, seperti MCK mesjid. Sarana air bersih ini dibangun sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat Desa Gunung Kijang mendapatkan air bersih karena faktor topografi dan jenis tanah/batu di Desa Gunung Kijang. Pada Gambar 2.21. terlihat bak penampungan air yang sangat kokoh dilengkapi dengan pompa dan pipa untuk menyedot air tanah dan menyalurkannya ke tempat-tempat yang dituju.



Gambar 2.21.

Sarana Air Bersih Desa Gunung Kijang

(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

- **Pengerasan Jalan**

Sarana fisik yang juga dibantu oleh COREMAP adalah pengerasan jalan di RT 5 Desa Gunung Kijang. Pengerasan jalan yang dibantu oleh COREMAP ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadikan jalan di RT 5 ini sebagai jalur lalu lintasnya. Jalan yang telah dilakukan pengerasan menjadi lebih baik dan lebih nyaman untuk dilalui. Jalan yang baik dan nyaman pada akhirnya akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan perekonomian, seperti jual beli hasil tangkapan ikan.

BAB III

PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KAWASAN GUNUNG KIJANG

Program penyelamatan terumbu karang melalui COREMAP di kawasan Gunung Kijang mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. Sampai dengan tahun 2011, berbagai kegiatan berkaitan dengan penyadaran masyarakat, pengawasan, MPA dan bantuan sarana fisik desa telah dilakukan. Setelah COREMAP dilaksanakan selama kurang lebih empat tahun, bagaimanakah dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat?

Uraian pada bab ini difokuskan pada gambaran perubahan pendapatan penduduk untuk mengetahui dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan usaha ekonomi produktif. Gambaran ini bisa dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan COREMAP dari aspek sosial-ekonomi, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran perubahan pendapatan masyarakat pada bagian ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan kondisi ekonomi masyarakat di Kawasan Gunung Kijang, khususnya Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang sejak COREMAP mulai dilaksanakan tahun 2007 hingga tahun 2011. Kajian mengenai gambaran perubahan penduduk ini didasarkan pada survei pendapatan rumah tangga pada *baseline* tahun 2007 dan hasil BME Sosial-Ekonomi tahun 2009 dan 2011 yang dilaksanakan di dua desa di Kawasan Gunung Kijang, yaitu Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang. Selain data survei, kajian ini juga memanfaatkan data dan informasi yang didapat melalui

wawancara terbuka pada narasumber dan diskusi kelompok terfokus pada pokmas dan nelayan.

Perubahan pendapatan yang akan dibahas meliputi pendapatan rumah tangga dan per-kapita, pendapatan rumah tangga nelayan dari kegiatan kenelayanan dan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh oleh kepala rumah tangga dan seluruh anggota rumah tangga yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan, baik dari pekerjaan pokok ataupun tambahan. Selain itu, pendapatan rumah tangga juga dapat berasal dari uang kiriman dan pensiun. Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan adalah pendapatan yang diperoleh dari kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan, pendapatan rumah tangga Pokmas adalah pendapatan rumah tangga yang diperoleh oleh kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga yang terlibat dalam Pokmas UEP.

3.1. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga dan Per-kapita

Penduduk yang tinggal di Kawasan Gunung Kijang mempunyai sumber pendapatan yang cukup bervariasi, di antaranya, adalah pendapatan dari usaha perkebunan kelapa, usaha perikanan (langsung dan tidak langsung), usaha perdagangan, serta jasa kemasyarakatan dan perorangan. Penduduk yang tinggal di beberapa desa yang terletak di kawasan pesisir, seperti Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang, umumnya mempunyai sumber pendapatan utama dari usaha perikanan baik langsung maupun tidak langsung. Pendapatan dari usaha perikanan yang bersifat langsung adalah pendapatan yang didapat dari usaha penangkapan ikan. Sementara itu, pendapatan dari usaha perikanan yang tidak langsung adalah pendapatan yang didapat dari usaha perdagangan hasil laut mulai pedagang kecil sampai dengan pedagang besar.

Sumber pendapatan lainnya berasal dari sektor perkebunan kelapa, pertambangan, dan jasa. Usaha perkebunan kelapa ini diusahakan secara turun-temurun dan merupakan sumber pendapatan yang diandalkan meskipun hasilnya cenderung mengalami penurunan yang disebabkan tidak adanya peremajaan tanaman. Penurunan hasil produksi dari perkebunan kelapa juga dikarenakan lahan kebun yang mulai berkurang akibat dikonversi menjadi perumahan dan menjadi tempat usaha, seperti tempat wisata (*cottage*). Sektor pertambangan yang mempunyai kontribusi adalah usaha pertambangan batu granit dan pasir. Usaha pertambangan ini umumnya dilakukan oleh perusahaan dan penduduk setempat memperoleh pendapatan dari bekerja sebagai karyawan.

Pendapatan yang bersumber dari jasa usaha kemasyarakatan, terutama berasal dari sektor pemerintahan seiring dengan peningkatan pembangunan Kabupaten Bintan serta terjadinya pemekaran kecamatan dan desa. Adanya pemekaran ini memberikan peluang kerja kepada penduduk setempat, baik sebagai pegawai negeri atau honorer.

Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga penduduk di Kawasan Gunung Kijang cenderung mengalami fluktuasi selama periode 2005-2011. Data perkembangan statistik pendapatan di lokasi COREMAP Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang tersaji pada Tabel 3.1. Pada periode 2007-2009 rata-rata pendapatan rumah tangga naik dari Rp 792.240 menjadi Rp 1.822.900 atau mengalami kenaikan sekitar 130 persen. Sebaliknya pada periode 2009-2011 rata-rata pendapatan rumah tangga turun dari Rp 1.822.900 menjadi Rp 1.784.310 atau turun sekitar 2,1 persen. Apabila dihitung perkembangan rata-rata pendapatan rumah tangga dari tahun 2007 sampai dengan 2011, maka

perkembangan rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar 125,2 persen (Tabel 3.1 dan Diagram 3.1).

Data statistik menunjukkan bahwa nilai median pendapatan pada tahun 2007, 2009, dan 2011 lebih kecil dari nilai rata-rata pendapatan rumah tangga. Hal ini mencerminkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga di lokasi kajian mempunyai pendapatan di bawah rata-rata rumah tangga. Walaupun secara umum terjadi peningkatan pendapatan, namun peningkatan pendapatan tersebut kemungkinan besar tidak dialami oleh semua rumah tangga. Hal tersebut terindikasi dari data tahun 2007-2009 yang menunjukkan bahwa pendapatan minimum turun dari Rp 117.250 menjadi Rp 66.600. Indikasi lainnya adalah penurunan pendapatan maksimum rumah tangga dari Rp 13.200.000 menjadi Rp 8.150.000. Walaupun demikian, secara umum, data perkembangan rata-rata pendapatan rumah tangga di Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat.

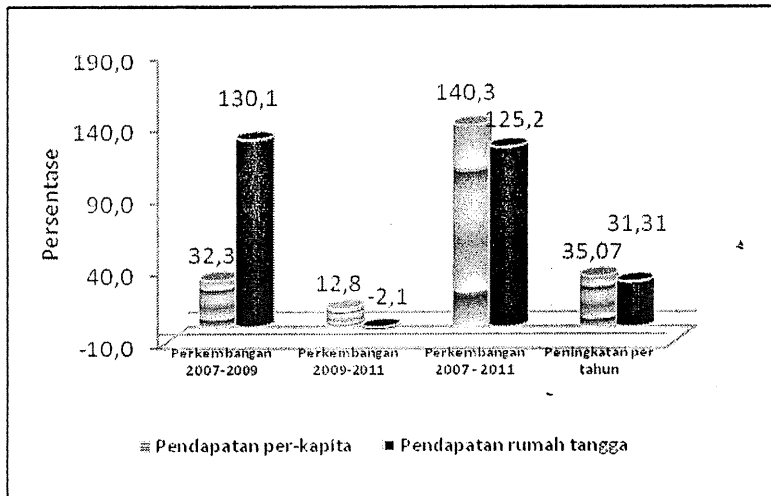
Tabel 3.1.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga
Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan
Tahun 2007, 2009, dan 2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)		
		2007	2009	2011
1	Pendapatan per kapita/bulan	226.530	482.400	544.280
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	792.240	1.822.900	1.784.310
3	Median pendapatan	561.000	1.275.000	1.566.660
4	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	117.250	66.660	279.330
5	Pendapatan rumah tangga maximum/bulan	4.433.333	13.200.000	8.150.000
N		100	100	100

Sumber: Data Primer, Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2007
Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009
Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Peningkatan pendapatan rumah tangga yang terjadi pada periode 2007-2009 berkaitan dengan kenaikan pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Selain itu, peningkatan pendapatan ini juga disebabkan adanya tambahan sumber penghasilan rumah tangga dari kegiatan industri rumah tangga, terutama pembuatan kerupuk ikan (lihat Box 3.1. dan Box 3.2.) dan dodol rumput laut. Industri pembuatan kerupuk ikan telah lama dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Malang Rapat, usaha ini semakin berkembang setelah ada bantuan dari pemerintah daerah dan COREMAP. Melalui dana mata pencaharian alternatif (MPA) COREMAP telah memberikan bantuan modal kepada para pengrajin kerupuk ikan. Usaha yang semula hanya dilakukan oleh beberapa rumah tangga, sekarang semakin berkembang. Sebagian usaha kerupuk ikan yang dilakukan oleh ibu-ibu sudah mempunyai omset yang cukup tinggi. Letak Desa Malang Rapa yang cukup strategis, berada pada jalur perjalanan menuju ke daerah wisata pantai Trikora menguntungkan para pengrajin kerupuk. Para wisatawan yang akan menuju dan pulang dari daerah wisata pantai Trikora singgah di desa ini untuk membeli oleh-oleh kerupuk ikan dan dodol rumput laut yang diproduksi oleh ibu-ibu dari Desa Malang Rapat.

Diagram 3.1.
Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga dan Per-kapita Desa
Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang,
Tahun 2007 – 2009



Sumber: Data Primer, Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2007
 Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009
 Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga pada periode 2009 - 2011 berkaitan dengan adanya penurunan pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Pendapatan dari kegiatan kenelayanan mengalami penurunan yang cukup besar selama periode 2009-2011. Penurunan terjadi terutama pada pendapatan nelayan pesisir yang menggunakan perahu bermotor ukuran kecil. Nelayan pesisir menurut masyarakat lokal adalah nelayan yang wilayah tangkapnya tidak jauh dari pantai. Nelayan pesisir ini sangat rentan terhadap perubahan musim angin. Jika musim gelombang besar, mereka tidak dapat melaut.

Trend perubahan pendapatan rumah tangga pada tahun 2007-2009 dan 2009-2011, terutama terjadi pada kelompok rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500.000 per bulan. Pada tahun 2007 rumah tangga yang termasuk dalam kelompok yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500.000 per bulan cukup besar, mencapai lebih dari 40 persen. Pada tahun 2009 kelompok rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500.000 hanya sebesar 14 persen dan pada tahun 2011 kelompok rumah tangga ini hanya sekitar 2 persen. Demikian pula dengan kelompok rumah tangga yang mempunyai pendapatan antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000 juga mengalami penurunan. Pada periode 2009-2011, persentase rumah tangga pada kelompok pendapatan ini menurun dari 28 persen menjadi 18 persen (Tabel 3.2.).

Tabel 3.2.
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan
di Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang,
Kabupaten Bintan Tahun 2006, 2008 dan 2011 (Persen)

No	Kelompok Pendapatan	2007	2009	2011
1	<500.000	42	14	2
2	500.000 – 999.999	32	28	18
3	1.000.000 – 1.499.999	15	15	26
4	1.500.000 – 1999.999	6	11	18
5	2.000.000 – 2.499.999	2	9	14
6	2.500.000 – 2.999.999	2	8	14
7	<3.000.000	1	14	8
Total		100	100	100
N		99	99	99

Sumber: Data Primer, Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2007
Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009
Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500.000 dan antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000 per bulan ini diperkirakan adalah rumah tangga nelayan pesisir yang wilayah tangkapnya dekat dengan pantai, buruh nelayan, dan petani. Petani di wilayah ini terutama adalah petani kelapa. Perkebunan kelapa di wilayah ini umumnya sudah dilakukan secara turun temurun. Tampaknya tidak ada upaya peremajaan tanaman kelapa, pohon-pohon kelapa yang ada sudah tua sehingga diperkirakan produksinya juga rendah.

Dengan berkembangnya waktu, usaha perkebunan kelapa tidak lagi menjadi sumber penghasilan utama. Para petani kelapa umumnya mempunyai sumber penghasilan lain yang menjadi sumber penghasilan utama, misalnya usaha dagang, pembuatan kerupuk, dan tukang ojek. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diperoleh informasi bahwa terdapat perubahan sumber penghasilan rumah tangga. Sebagian dari rumah tangga petani kelapa anak-anaknya telah ada yang menjadi pegawai tambang bauksit, pegawai negeri, dan pegawai honorer di kantor desa, kecamatan, dan pemerintah Kabupaten Bintan. Dengan adanya perubahan ini, sumber pendapatan rumah tangga bertambah dan dengan sendirinya meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Pendapatan rata-rata rumah tangga periode 2009-2011 menurun sekitar 2,1 persen. Dari data distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan dapat diketahui bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas Rp 3.000.000. Pada tahun 2009, jumlah rumah tangga yang berpendapatan lebih dari Rp 3.000.000 sebesar 14 persen. Jumlah ini menurun menjadi hanya 8 persen pada tahun 2011. Kelompok pendapatan di atas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000 secara umum mengalami peningkatan (Tabel 3.2).

Pendapatan Per-Kapita

Berbeda dengan pendapatan rumah tangga, trend pendapatan per-kapita menunjukkan perkembangan/kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pendapatan per-kapita sebesar Rp 226.530 naik menjadi Rp 482.400 pada tahun 2009 dan pada tahun 2011 mencapai Rp 544.280. Pada periode 2007 - 2009 pendapatan per kapita mengalami perkembangan sebesar 32,3 persen dan pada periode 2009-2011 mengalami perkembangan sebesar 12 persen.

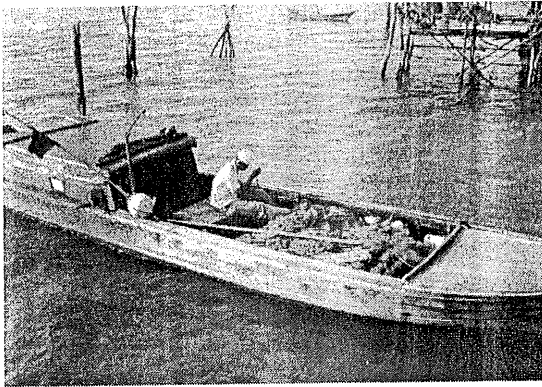
Pendapatan per-kapita di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang selama periode 2007 sampai dengan 2011 telah naik sebesar 140,3 persen atau terjadi peningkatan per tahun sebesar 35,07 persen. Pendapatan per-kapita di kedua desa dengan nilai sebesar Rp 544.280 jauh di atas garis kemiskinan per-kapita Kabupaten Bintan tahun 2009 yang nilainya Rp 260.143.

3.2. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan adalah pendapatan yang diterima oleh kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan, baik sebagai pekerjaan utama maupun tambahan. Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan umumnya berfluktuasi tergantung pada musim. Pada musim gelombang besar, pendapatan nelayan pada umumnya cenderung menurun. Sebaliknya, pada musim gelombang lemah, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan cenderung naik. Sementara itu, pendapatan rumah tangga pada musim pancaroba biasanya berada pada kisaran antara pendapatan pada musim gelombang besar dan musim gelombang lemah.

Jumlah rumah tangga yang memperoleh pendapatan dari kegiatan kenelayanan selama periode 2007-2011 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009, dari 100 rumah tangga sampel terdapat 74 rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari usaha kenelayanan (menangkap ikan). Jumlah rumah tangga ini sedikit mengalami kenaikan pada survei yang dilaksanakan tahun 2011, yaitu menjadi 75 rumah tangga. Penurunan jumlah rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari kegiatan kenelayanan ini kemungkinan disebabkan pada tahun 2007 saat survei dilakukan terdapat beberapa rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan yang kemudian pada tahun 2011 sudah tidak bekerja sebagai nelayan lagi.

Musim gelombang kuat terjadi pada musim utara yang umumnya berlangsung antara 3-4 bulan yang biasanya berlangsung antara bulan November sampai dengan awal Maret. Namun pada akhir-akhir ini musim gelombang sudah susah untuk diprediksi lagi. Menurut beberapa nelayan, musim gelombang kuat cenderung menjadi lebih lama. Pada musim ini, nelayan pesisir yang menggunakan perahu kecil umumnya tidak bisa melaut karena keterbatasan mesin motor yang dipakai. Umumnya kegiatan melaut hanya dilakukan oleh para nelayan yang memiliki motor dengan kapasitas yang cukup besar. Sebaliknya, pada musim gelombang lemah atau musim teduh yang biasanya dikenal oleh masyarakat setempat sebagai musim angin timur, para nelayan umumnya hampir semuanya melaut. Bahkan, para nelayan pesisir bisa dua kali melaut dalam satu hari.



Gambar 3.1.
Kegiatan Kenelayanan di Desa Malang Rapat
(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Pada musim pancaroba, yaitu waktu perpindahan antara waktu musim gelombang kuat dan gelombang lemah, para nelayan masih sekali-kali melaut. Kondisi cuaca di laut, kadang -kadang terjadi gelombang kuat, tetapi ada kalanya cuaca cukup bersahabat. Pada musim ini nelayan masih bisa melakukan aktifitas melaut pada saat kondisi cuaca bersahabat. Musim pancaroba umumnya terjadi sekitar 4 bulan. Namun akhir-akhir ini musim pancaroba cenderung terjadi lebih panjang, menjadi sekitar 5-6 bulan. Pada tahun 2011 ini musim pancaroba berlangsung sekitar 6 bulan dan musim gelombang kuat dan lemah sekitar 3 bulan. Pembagian musim ini dipakai untuk menghitung pendapatan rata-rata nelayan dalam satu tahun dan selanjutnya dikonversikan menjadi pendapatan dari kegiatan kenelayanan dalam satu bulan.

Tabel 3.3.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan
di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan,
Tahun 2007, 2009 dan 2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)		
		2007	2009	2011
1	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	677.970	1.6803.290	1.303.340
2	Median pendapatan	440.000	855.000	1.086.660
3	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	99.170	25.000	75.000
4	Pendapatan rumah tangga maksimum/bulan	4.100.00	13.200.000	7.350.000
N		79	74	75

Sumber: Data Primer, Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2007
 Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009
 Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Tabel 3.3 memperlihatkan statistik pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan dari tahun 2007, 2009 dan 2011. Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan berfluktuasi. Pada periode 2007-2009 rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan meningkat cukup tajam. Dari sekitar Rp 677.970 menjadi Rp 1.683.290 atau terjadi kenaikan sebesar 148 persen selama dua tahun. Namun pada periode tahun 2009-2011 terjadi penurunan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan dari Rp 1.683.290 menjadi Rp 1.303.340. Persentase penurunan pada periode ini sekitar 22.3 persen.

Kenaikan pendapatan nelayan pada periode 2007 - 2009, terutama terjadi pada kelompok pendapatan yang tinggi. Data tahun 2009 memperlihatkan median pendapatan yang nilainya hanya mencapai Rp 855. 000,- sementara rata-rata pendapatannya sebesar Rp

1.683.290. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari 50 persen) rumah tangga mempunyai pendapatan sekitar Rp 855.000. Demikian pula, trend penurunan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada periode 2009-2011 juga berkaitan dengan menurunnya jumlah rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas Rp 3 juta.

Tabel 3.4.

Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2007, 2009 dan 2011 (Persen)

No	Kelompok Pendapatan	2007	2009	2011
1	<500.000	42	14,1	8,0
2	500.000 – 999.999	32	28,3	32,0
3	1.000.000 – 1.499.999	15	15,2	33,3
4	1.500.000 – 1999.999	6	11,1	12,0
5	2.000.000 – 2.499.999	2	9,1	8,0
6	2.500.000 – 2.999.999	82	8,1	1,3
7	<3.000.000	1	13,1	5,3
Total		100	100	100
N				75

Sumber: Data Primer, Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2007

Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009

Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Trend Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim

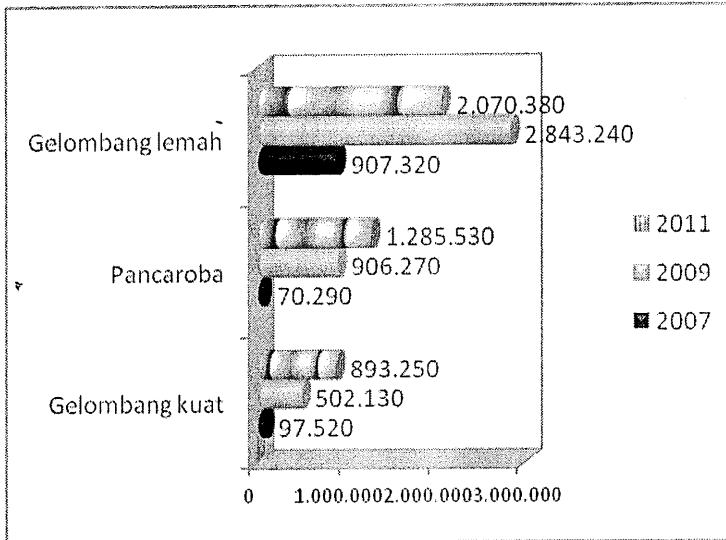
Seperti halnya tempat lain di wilayah pesisir di Indonesia, pola pendapatan dari kegiatan kenelayanan bervariasi menurut musim. Pendapatan pada waktu musim gelombang lemah, cenderung cukup tinggi. Sebaliknya, pada musim gelombang kuat, pendapatan sangat rendah. Sementara itu, pendapatan pada musim pancaroba berkisar

antara pendapatan pada musim gelombang kuat dan gelombang lemah.

Hasil kajian menginformasikan bahwa pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan mengalami perbedaan yang cukup mencolok antar musim. Namun, dalam perkembangannya perbedaan pendapatan menurut musim tersebut dari tahun ke tahun semakin berkurang. Pada tahun 2007, rata-rata pendapatan dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang lemah berkisar Rp 907.320. Sebaliknya, rata-rata pendapatan pada musim gelombang kuat hanya berkisar Rp 97.520 atau 10 persen dari pendapatan pada musim gelombang lemah.

Pada tahun 2009, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang lemah sebesar Rp 2.843.240 dan pada musim gelombang kuat sebesar Rp 502.130 atau sekitar 18 persen dari pendapatan pada musim gelombang lemah. Dua tahun berikutnya perbedaan pendapatan menurut musim semakin menipis. Pendapatan rata-rata rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang lemah pada tahun 2011 sebesar Rp 2.070.380 dan pada musim gelombang kuat sekitar Rp 893.250. Dengan demikian pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang kuat sekitar 43 persen dari pendapatan pada musim gelombang lemah (Diagram 3.2).

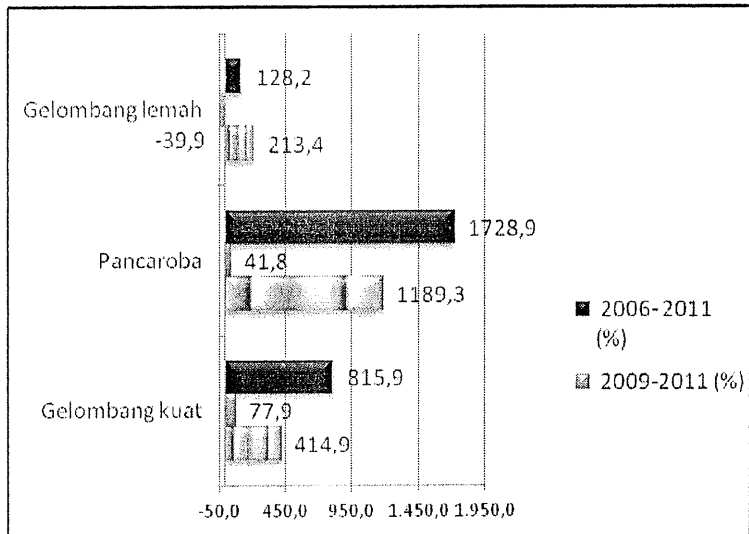
Diagram 3.2.
Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan
Kenelayanan Menurut Musim di Desa Malang Rapat dan
Gunung Kijang, Tahun 2007, 2009 dan 2011



Sumber: Data Primer, Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2007
 Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009
 Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

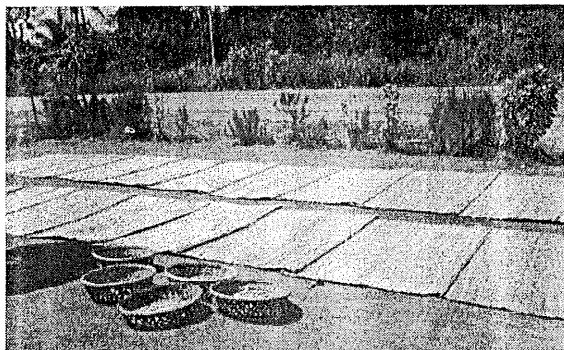
Diagram (3.3) menggambarkan trend peningkatan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menurut musim dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Peningkatan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan yang cukup tinggi justru terjadi pada musim pancaroba. Sebaliknya, peningkatan terendah terjadi pada musim gelombang lemah. Sementara itu, pada musim gelombang kuat peningkatannya berada pada nilai antara peningkatan pada gelombang lemah dan musim pancaroba.

Diagram 3.3.
Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan
Kenelayanan Di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang,
Tahun 2007, 2009 dan 2011 (Persen)



Sumber: Data Primer, Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2007
 Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009
 Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Pada musim pancaroba periode 2007-2009, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan naik lebih dari 10 kali lipat (sekitar 1189 persen). Peningkatan yang cukup tinggi juga terjadi pada periode 2007-2011 yang mengalami peningkatan hampir 1728 persen. Pendapatan pada musim pancaroba yang peningkatannya tidak terlalu tinggi terjadi pada periode 2009-2011.



Gambar 3.2.

Penjemuran Ikan Teri/Bilis di Desa Malang Rapat

(Sumber: Koleksi Pribadi Abdurrahim, 2011)

Berbeda dengan pola peningkatan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim pancaroba dan musim gelombang besar, peningkatan pendapatan pada musim gelombang lemah tertinggi terjadi pada periode 2007-2009 yang mencapai 219 persen. Sedangkan, pada periode 2007-2011 hanya meningkat sebesar 112 persen. Pada periode 2009-2011, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan justru mengalami penurunan sebesar 39,9 persen.

3.3. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas Penerima Dana MPA

Seperti telah diulas pada bagian sebelumnya bahwa pengembangan kegiatan MPA ditujukan untuk meningkatkan/menambah pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir dari kegiatan usaha selain kegiatan penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya laut lainnya. Dengan peningkatan pendapatan tersebut diharapkan masyarakat pesisir dapat mengurangi kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan kenelayanan lainnya. Pengurangan

kegiatan tersebut diharapkan akan mengurangi tekanan terhadap laut dan sumberdaya sehingga kelestariannya, termasuk ekosistem terumbu karang akan tetap terpelihara.

Tulisan berikut ini akan menjelaskan pengaruh kegiatan MPA terhadap perkembangan pendapatan penerima dana MPA. Informasi ini diharapkan dapat menggambarkan pengaruh kegiatan MPA terhadap perubahan kondisi kesejahteraan rumah tangga penerima dana MPA. Pembahasan perkembangan pendapatan penerima MPA pada bagian ini berdasar pada hasil survei terhadap rumah tangga yang menerima manfaat dari bantuan dana MPA. Rumah tangga yang menerima manfaat bantuan dana MPA adalah rumah tangga yang anggota keluarganya ada yang menjadi anggota pokmas.

- **Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Pokmas 2009-2011**

Data statistik pendapatan anggota Pokmas yang menerima dana MPA tahun 2009 dan 2011 menunjukkan adanya kenaikan pendapatan rumah tangga dan per-kapita. Pendapatan rata-rata rumah tangga anggota Pokmas yang menerima dana MPA selama periode 2009-2011 mengalami peningkatan dari Rp 1.518.090 menjadi Rp 1.683.350 atau telah terjadi peningkatan sebesar 10,89 persen. Sedangkan pendapatan per-kapitanya meningkat sebesar 27,7 persen. Pada tahun 2009 pendapatan per-kapita sebesar Rp 394.930 naik menjadi Rp 504.390 pada tahun 2011. (Tabel 3.5.).

Tabel 3.5.

**Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana Mata Pencapaian
Alternatif Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan
Tahun 2006, 2008 dan 2011**

No	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)	
		2009	2011
1	Pendapatan per kapita/bulan	394.930	504.390
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	1.518.090	1.683.350
3	Median	875.000	1.443.330
4	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	183.330	726.660
5	Pendapatan rumah tangga maksimum/bulan	5.525.000	4.200.330
N		24	25

Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009

Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Data statistik pendapatan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.518.090. Nilai rata-rata pendapatan rumah tangga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai median pendapatan. Hal ini merupakan indikasi bahwa sebagian besar rumah tangga anggota Pokmas yang mendapatkan dana mata pencaharian alternative mempunyai pendapatan sekitar Rp 875.000 atau dibawah rata-rata pendapatan rumah tangga. Perbedaan nilai median dan rata-rata pendapatan mencapai sekitar Rp 568.000. Sebaliknya, terdapat sebagian kecil rumah tangga yang mempunyai pendapatan jauh lebih besar dari pendapatan rata-rata rumah tangga.

Dua tahun kemudian, perbedaan nilai median pendapatan rumah tangga dan rata-rata rumah tangga semakin mengecil. Nilai median pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.443.330 dan rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.683.350 sehingga selisihnya hanya sekitar Rp 165.000. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga anggota Pokmas yang menerima dana bergulir

mempunyai pendapatan yang mendekati rata-rata pendapatan. Selain itu, minimum pendapatan juga mengalami kenaikan dan sebaliknya nilai maksimum pendapatan mengalami penurunan. Nilai minimum pendapatan pada tahun 2009 sebesar Rp 183.330 naik menjadi Rp 726.600 pada tahun 2011. Sebaliknya nilai maksimum mengalami penurunan dari Rp 5.525.000 menjadi Rp 4.220.330. Dengan demikian perbedaan antara rumah tangga yang mempunyai pendapatan besar dan kecil menjadi semakin mengecil.

Kenaikan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas juga terlihat dari perubahan distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan dari tahun 2009 dan 2011. Perubahan tersebut terutama terjadi pada rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah Rp 500.000 dan rumah tangga yang berpendapatan antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000 dan kelompok pendapatan antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000. Pada tahun 2009 terdapat sekitar 16 persen rumah tangga anggota Pokmas yang mempunyai pendapatan di bawah Rp 500.000. Pada tahun 2011 sudah tidak ada lagi rumah tangga anggota Pokmas yang mempunyai pendapatan di bawah Rp 500.000. Berikutnya perubahan terjadi pada kelompok rumah tangga yang berpendapatan antara Rp.500.000 sampai dengan Rp 1.000.000 yang menunjukkan penurunan proporsi dari sekitar 37 persen menjadi hanya 16 persen. Perubahan terbesar terjadi pada kelompok yang berpendapatan antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000. Pada tahun 2009 tidak ada rumah tangga yang mempunyai pendapatan antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000. Pada tahun 2011 jumlah rumah tangga yang berpendapatan antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000 meningkat menjadi 26 persen. Diperkirakan kelompok ini adalah rumah tangga yang sebelumnya hanya mempunyai pendapatan di bawah Rp 500.000 dan antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000 (Tabel 3.6).

Tabel 3.6.

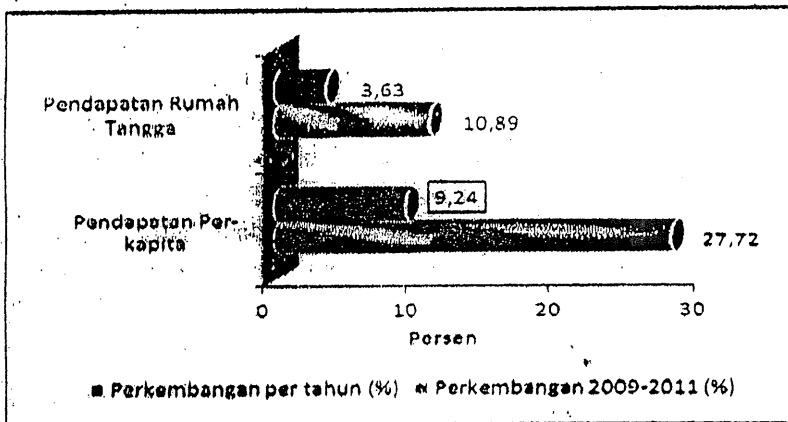
**Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Mata Pencapaian Alternatif (MPA)
Menurut Kelompok Pendapatan di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang,
Kabupaten Bintan Tahun 2009 dan 2011**

No	Kelompok Pendapatan	2009	2011
1	<500.000	16,7	0
2	500.000 – 999.999	37,5	16,0
3	1.000.000 – 1.499.999	0	36,0
4	1.500.000 – 1.999.999	16,7	20,0
5	2.000.000 – 2.499.999	16,7	16,0
6	2.500.000 – 2.999.999	4,2	4,0
7	<3.000.000	8,3	8
	Total	100	100
	N	24	25

Sumber : Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008
Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Diagram 3.4.

**Perkembangan Pendapatan Per-kapita dan Rata-rata Rumah Tangga Penerima
Dana MPA, Di Desa Kijang dan Malang Rapat, Kabupaten Bintan,
Tahun 2009-2011 (Persen)**



Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009
Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

- **Perbandingan Pendapatan Rumah Tangga Pokmas dan Non - Pokmas**

Lebih besarnya pendapatan rumah tangga anggota Pokmas dibandingkan bukan anggota Pokmas tidak dengan sendirinya merefleksikan pengaruh kegiatan MPA terhadap pendapatan Pokmas. Hal tersebut dikarenakan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas tidak hanya diperoleh dari pendapatan dari kegiatan MPA, tetapi juga pendapatan dari sumber lainnya dari beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari satu anggota rumah tangga.

Tabel 3.7.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Pokmas dan Non- Pokmas
Di Kawasan Gunung Kijang, Tahun 2011

Pendapatan	Rumah Tangga Pokmas	Rumah Tangga Non Pokmas
Per-kapita	504.390	557.570
Rata-rata Rumah Tangga	1.683.350	1.817.960
Median	1.443.330	1.600.000
Minimum Rumah Tangga	726.660	279.330
Maksimum Rumah Tangga	4.203.330	8.150.000

Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2009

Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Tabel 3.7 menyajikan statistik pendapatan rumah tangga anggota Pokmas dan Non-Pokmas tahun 2011. Pendapatan rata-rata rumah tangga anggota Pokmas lebih rendah (Rp1.683.3500) dibandingkan rumah tangga bukan anggota Pokmas (Rp 1.817.960). Bila ditelusuri lebih lanjut data menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga anggota Pokmas secara umum lebih rendah dari pendapatan rumah tangga yang bukan Pokmas. Hal tersebut terlihat dari median pendapatan. Sebagian besar rumah tangga anggota Pokmas mempunyai pendapatan Rp 1.443.330. Sementara sebagian

besar rumah tangga bukan anggota Pokmas mempunyai pendapatan sebesar Rp 1.600.000.

Dari data statistik juga dapat diketahui bahwa kesenjangan pendapatan lebih besar pada rumah tangga bukan Pokmas dibandingkan dengan rumah tangga Pokmas. Pendapatan minimum rumah tangga Pokmas sebesar Rp 279.000 dan maksimum mencapai lebih dari Rp 8.000.000. Sedangkan pendapatan minimum rumah tangga Pokmas sebesar Rp 726.660 dan pendapatan maksimum sebesar Rp 4.202.330.

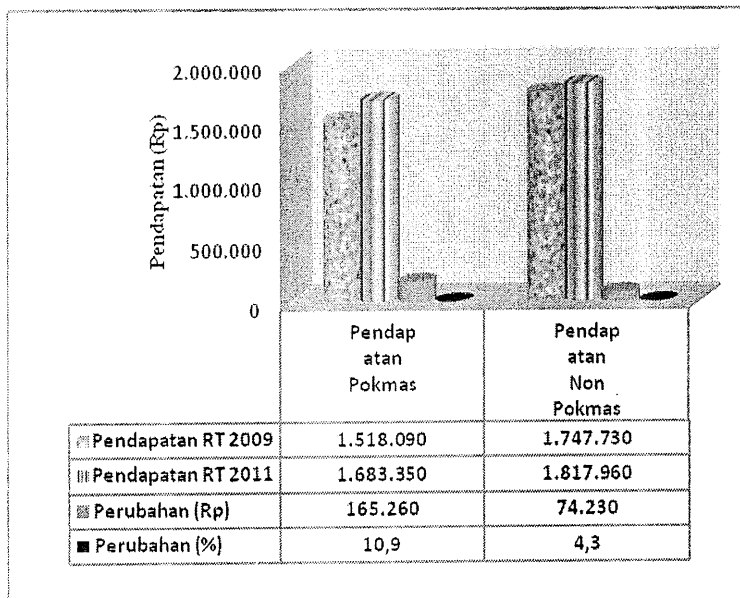
Lebih kecilnya pendapatan rumah tangga Pokmas dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga bukan Pokmas menunjukkan bahwa rumah tangga yang terpilih dan mendapatkan dana MPA secara umum berasal dari rumah tangga yang mempunyai pendapatn lebih rendah dari rata-rata pendapatan total semua rumah tangga. Rumah tangga ekonomi lemah yang berpendapatan rendah adalah sasaran yang tepat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemilihan rumah tangga yang mempunyai pendapatan rendah yang mendapatkan dana MPA sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah.

Pengaruh kegiatan MPA yang dilaksanakan oleh COREMAP di kedua desa kajian terlihat dari perbandingan perkembangan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas dan bukan Pokmas. Diagram 3.5 menggambarkan perbandingan perkembangan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas yang menerima dana mata pencaharian alternatif (MPA) dan non Pokmas yang tidak menerima dana MPA. Secara umum pendapatan rumah tangga Pokmas penerima dana MPA lebih rendah dari non-Pokmas. Pada tahun 2009 pendapatan rumah tangga penerima dana MPA sebesar Rp 1.518.090 dan pendapatan rumah tangga non-Pokmas sebesar Rp 1.747.730. Dua

tahun kemudian, tahun 2011 pendapatan rumah tangga anggota Pokmas penerima dana MPA naik menjadi Rp 1.683.350 dan pendapatan non - Pokmas naik menjadi Rp 1.817.960.

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas penerima dana MPA lebih tinggi dibandingkan dengan Non Pokmas. Dalam dua tahun pendapatan rumah tangga anggota Pokmas penerima dana MPA naik sebesar Rp 165.260 atau naik sekitar 10,9 persen. Sedangkan kenaikan pendapatan rumah tangga non Pokmas dalam dua tahun hanya sebesar Rp 74.300 atau naik sekitar 4,3 persen.

Diagram 3.5.
Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas Penerima Dana MPA dan Non Pokmas di Kawasan Kijang, Tahun 2009 dan 2011



Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008
Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Dari wawancara dengan narasumber para pengrajin kerupuk yang menerima dana MPA dapat diketahui bahwa kegiatan MPA bermanfaat dan sangat membantu usahanya. Di samping memberikan modal usaha, kegiatan MPA yang dilaksanakan oleh PIU COREMAP Kabupaten Bintan, juga memberikan bimbingan dan fasilitasi untuk meningkatkan usaha. Bimbingan dan fasilitasi tersebut diantaranya adalah pemberian mesin alat untuk melekatkan kemasan plastik kerupuk dan desain *logo* merk dagang dari COREMAP. Kemasan plastik yang rapi dan *logo* merk dagang membuat kerupuk hasil produksi para pengrajin dari Desa Malang Rapat lebih menarik konsumen. Omset penjualan juga meningkat dengan adanya kemasan yang ada *logo* merk dagangnya. Kerupuk ikan dan kerupuk atom hasil produksi para pengrajin dari Desa Malang Rapat yang telah dikemas dengan logo merk dagang sudah dipasarkan ke sebuah supermarket di Kota Tanjung Pinang. Bimbingan dan fasilitasi lainnya yang diberikan oleh pengelola COREMAP Kabupaten Bintan adalah membantu pemasaran. Bantuan pemasaran ini kerupuk ikan dan kerupuk atom ini diantaranya dilakukan dengan mempromosikan pada tamu-tamu dari Jakarta atau kota - kota lainnya yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Bintan.

Box 3.1. Analisis Laba Rugi Usaha Kerupuk Ikan-Pokmas
Bandeng (Penjualan dalam Partai Besar-Bal) ₄

Pemasukan

Jumlah	Nama Komponen	Harga Satuan	Total
	Penjualan Partai		
38 kg	Besar	80.000	3.040.000

Pengeluaran

Jumlah	Nama Komponen	Harga Satuan	Total
30 kg	Ikan Tenggiri	24.000	720.000
20 kg	Tepung Sagu	5.000	100.000
10 lt	Minyak Goreng	12.000	120.000
3 kg	Gula Pasir	9.500	28.500
0,5 kg	Bawang	12.000	6.000
3 bks	Garam	1.000	3.000
2 bks	MSG	6.500	13.000
0,25 bks	Soda	5.000	1.250
0,75 tbg	LPG 12 kg	90.000	67.500
	Upah Tenaga Kerja 5 org		150.000
	Total Pengeluaran		1.209.250

Keuntungan

Pemasukan -
= Pengeluaran
= **1.830.750**

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pokmas Bandeng

Box 3.2. Analisis Laba Rugi Usaha Kerupuk Ikan-Pokmas Bandeng
(Penjualan dalam Kemasan Plastik Kecil)

Pemasukan

Jumlah	Nama Komponen	Harga Satuan	Total
266 pak	Penjualan dalam Kemasan Plastik Kecil	15.000	3.990.000

Pengeluaran

Jumlah	Nama Komponen	Harga Satuan	Total
30 kg	Ikan Tenggiri	24.000	720.000
20 kg	Tepung Sagu	5.000	100.000
10 lt	Minyak Goreng	12.000	120.000
3 kg	Gula Pasir	9.500	28.500
0,5 kg	Bawang	12.000	6.000
3 bks	Garam	1.000	3.000
2 bks	MSG	6.500	13.000
0,25 bks	Soda	5.000	1.250
0,75 tbg	LPG 12 kg	90.000	67.500
266 ktg	Kemasan Plastik+Label	1.5000	399.000
	Upah Tenaga Kerja 5 org		200.000
	Total Pengeluaran		1.658.250

Keuntungan

$$= \text{Pemasukan} - \text{Pengeluaran}$$

$$= \mathbf{2.331.750}$$

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pokmas Bandeng

Hasil kajian tentang perubahan pendapatan masyarakat menginformasikan bahwa pendapatan rumah tangga mengalami fluktuasi pada periode 2007-2011. Pada periode 2007-2009, pendapatan rumah tangga mengalami perkembangan dari Rp 792.242 menjadi Rp 1.822.908 atau mengalami perkembangan kurang lebih

sebesar 130 persen, sedangkan pada periode 2009-2011 pendapatan rumah tangga mengalami sedikit penurunan sekitar 2 persen. Namun demikian, secara umum pendapatan rumah tangga cenderung menunjukkan kenaikan sejak tahun 2007 sampai dengan 2011. Perkembangan pendapatan rumah tangga tersebut berkisar 125 persen atau mengalami kenaikan sekitar 31.5 persen per tahun.

Seiring dengan kenaikan pendapatan rumah tangga, pendapatan per-kapita juga mengalami peningkatan selama periode 2007 sampai dengan 2011. Pendapatan per-kapita pada tahun 2007 sebesar Rp 226.530 naik menjadi Rp 482.400 pada tahun 2009. Hasil kajian tahun 2011 pendapatan per-kapita hampir menembus Rp 544.280. Selama periode 2007-2011, pendapatan per-kapita naik sebesar 135 persen atau 35 persen per tahun.

Gambaran pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan selama periode 2007-2011 juga berfluktuasi. Pada periode 2007 sampai 2009 menunjukkan adanya kenaikan dari Rp 677.970 naik menjadi Rp 1.683.290 dan kemudian cenderung mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi Rp 1.303.340. Penurunan pendapatan nelayan dari kegiatan kenelayanan ini terutama terjadi pada kelompok rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas Rp 3 juta. Kelompok berpendapatan di atas Rp 3 juta ini umumnya adalah nelayan bagan dengan target tangkapan ikan bilis. Karena meningkatnya ongkos produksi beberapa nelayan tidak beroperasi pada saat survei dilakukan. Sedangkan yang beroperasi hasil tangkapannya cenderung menurun.

Kajian ini juga menginformasikan bahwa pendapatan rumah tangga penerima dana MPA menunjukkan kenaikan sebesar 10 persen selama periode 2009-2011. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan rumah tangga bukan anggota Pokmas yang hanya naik sekitar 4 persen.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

COREMAP merupakan program yang bertujuan untuk penyelamatan terumbu karang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Indikasi keberhasilan program dari aspek sosial adalah adanya perubahan perilaku dari kegiatan yang merusak menjadi kegiatan yang positif untuk menyelamatkan dan melestarikan terumbu karang. Dari aspek ekonomi keberhasilan program dapat dilihat dari adanya perubahan atau peningkatan pendapatan, khususnya pendapatan yang bersumber dari kegiatan yang telah difasilitasi oleh COREMAP.

Kajian ini menemukan bahwa pelaksanaan program penyelamatan terumbu karang di Kawasan Gunung Kijang, telah berjalan cukup baik. Walaupun belum optimal, kegiatan MPA di beberapa Pokmas telah mengalami perkembangan dan memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kegiatan lainnya, yaitu pembangunan prasarana dan sarana fisik desa yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pengelolaan terumbu karang telah terlaksana dengan dibangunnya tambatan perahu, pondok informasi, bangsal kerja dan ruang promosi, MCK, tempat sampah, dan sarana air bersih.

Capaian Ekonomi

- **Perubahan pendapatan**

Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan COREMAP di Kawasan Gunung Kijang dari aspek ekonomi telah menunjukkan keberhasilan. Kondisi ini terlihat dari peningkatan pendapatan masyarakat di dua desa yang menjadi sampel kajian. Selama kurun waktu empat tahun, yaitu sejak dimulainya COREMAP tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, pendapatan rumah tangga telah naik sebesar 125,1 persen atau sekitar 31,5 persen per tahun. Pada tahun 2011, pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.784.310. Empat tahun sebelumnya, yaitu pada saat kegiatan COREMAP dimulai tahun 2007 pendapatan rumah tangga sebesar Rp 792.240.

Gambaran berhasilnya COREMAP di Kawasan Gunung Kijang dari aspek ekonomi juga terlihat dari peningkatan pendapatan per-kapita yang secara signifikan telah naik dari sebesar 140,3 persen atau terjadi kenaikan per tahun sebesar 35,1 persen per tahun. Pada tahun 2007, pendapatan per kapita sebesar Rp 226.530 naik menjadi Rp 544.482 pada tahun 2011. Pendapatan per-kapita masyarakat di Kawasan Kijang ini berada diatas garis kemiskinan per-kapita Kabupaten Bintan Tahun 2009 yang nilainya sebesar Rp 260.143.

Kenaikan pendapatan juga terjadi pada rumah tangga yang mempunyai sumber penghasilan dari kegiatan kenelayanan, baik nelayan tangkap atau budidaya. Meskipun mengalami fluktuasi, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menunjukkan kenaikan sebesar 92 persen selama periode 2007 sampai dengan 2011. Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan naik cukup signifikan pada kurun waktu 2007-2009. Kenaikan pendapatan mencapai 148 persen. Namun, pada periode 2009 -2011 pendapatan dari kegiatan kenelayanan mengalami sedikit penurunan

sekitar 23 persen. Penurunan ini terutama dialami oleh nelayan yang berpenghasilan di atas Rp 3 juta per bulan. Rumah tangga nelayan yang berpenghasilan di atas Rp 3 juta per bulan, umumnya, adalah nelayan kelong dengan target tangkapan utama ikan teri. Pada saat survei dilakukan bulan Juli, hasil tangkapan nelayan sedikit mengalami penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan bulan Juli sampai dengan Agustus adalah masa di mana hasil tangkap kurang maksimal karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Di samping hasilnya tidak maksimal, biaya operasional juga bertambah. Meningkatnya biaya operasional semakin mengurangi penghasilan nelayan.

Berhasilnya COREMAP di kawasan ini juga terlihat dari kenaikan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas yang mendapat bantuan untuk pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA). Pendapatan rumah tangga penerima dana MPA telah meningkat lebih dari 10 persen selama dua tahun (2009-2011). Pada tahun 2009, pendapatan rumah tangga anggota Pokmas penerima dana MPA sebesar Rp 1.518.090 meningkat menjadi Rp 1.683.350 pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas penerima dana MPA ini lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga yang bukan Pokmas.

• **Perkembangan Kegiatan MPA**

Secara umum pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif dari dana MPA di Kawasan Gunung Kijang cukup berhasil, walaupun belum maksimal. Kegiatan ekonomi produktif dari 19 Pokmas yang ada di Desa Gunung Kijang dan Malang Rapat mempunyai capaian yang bervariasi, ada yang cukup sukses, tetapi adapula yang gagal.

Di Desa Gunung Kijang ada enam (6) Pokmas yang telah mendapatkan dana MPA. Dari ke enam Pokmas tersebut, terdapat satu

Pokmas, yaitu Trunojoyo dengan kegiatan budidaya lele yang mempunyai kinerja cukup baik. Dua Pokmas, yaitu Ketam Renjong dan Kuda Laut dengan kegiatan budidaya kerapu masih aktif dan sudah panen dengan hasil yang belum maksimal. Sedangkan tiga Pokmas, yaitu Pokmas Sotong Karang dan Tembakul yang mempunyai kegiatan budidaya kepiting serta Pokmas Agar-agar dengan usaha pembuatan kerupuk sampai kajian ini dilakukan sudah tidak menunjukkan adanya aktifitas.

Pokmas Trunojoyo merupakan Pokmas dengan kegiatan budidaya lele yang cukup berhasil di Desa Gunung Kijang. Dengan hasil panen pertama, kelompok ini telah berhasil menebarkan benih lele yang dibeli dari Pekanbaru. Kondisi lahan yang sesuai, pengairan yang cukup, dan pengelolaan dari kelompok yang cukup baik menjadikan budidaya ini bisa bertahan. Kendala yang dihadapi adalah mahalnya bahan pakan lele.

Dua Pokmas yang mempunyai kegiatan budidaya kerapu, yaitu Pokmas Kuda Laut dan Ketam Renjong masih aktif sampai kajian ini dilakukan. Namun demikian, usaha budidaya kerapu ini mengalami banyak kendala, diantaranya keaktifan anggota dan lemahnya pembukuan. Usaha budidaya ini telah berhasil panen, meskipun hasilnya masih relatif kecil.

Usaha budidaya kepiting yang dilakukan oleh dua Pokmas mengalami kegagalan. Berdasarkan keterangan narasumber, kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan lemahnya pengelolaan di dalam kelompok. Di samping itu, kemungkinan juga dikarenakan budidaya kepiting secara teknis masih memerlukan bimbingan yang intensif dari penyuluh yang mempunyai keahlian di bidangnya.

Pokmas Agar-agar merupakan satu-satunya Pokmas jender di Desa Gunung Kijang dengan kegiatan memproduksi kerupuk ikan dan

pengolahan rumput laut. Namun sayangnya, Pokmas ini tidak menunjukkan perkembangan kegiatan yang baik karena kesibukan masing-masing anggota. Sampai dengan kajian ini dilakukan Pokmas ini tidak ada aktifitasnya.

Di Desa Malang Rapat terdapat 13 Pokmas yang telah mendapat dana MPA. Perkembangan ke 13 Pokmas tersebut cukup beragam. Sampai kajian ini dilakukan dari 13 Pokmas tersebut sekitar 9 Pokmas yang masih beraktifitas dengan kinerja yang berbeda-beda dan sisanya 4 Pokmas sudah tidak beraktifitas.

Pokmas yang kinerjanya cukup baik adalah Pokmas Jender dengan kegiatan pengolahan kerupuk ikan, dodol rumput laut, ikan asin, rempeyek, dan kue-kue. Satu Pokmas UEP dengan kegiatan budidaya lele juga menunjukkan perkembangan cukup baik.

Di antara Pokmas yang memproduksi kerupuk ikan, Pokmas Bandeng dapat dikatakan menjadi Pokmas yang paling sukses karena telah berhasil memasarkan produksinya ke supermaket dan pasar swalayan di Kota Tanjung Pinang. Pengelola COREMAP di tingkat kabupaten memberikan bimbingan dan fasilitasi berupa plastik kemasan dan label atau logo merk dagang dengan tulisan “Kerupuk Atom Emi”. Usaha ini kadang-kadang menemui kendala kurangnya bahan baku di pasaran lokal (tingkat desa) sehingga untuk mencari bahan baku kadang-kadang sampai ke Kota Bintan atau ke Pelabuhan Kijang.

Selain Pokmas Bandeng, Pokmas Silaturahmi yang juga mempunyai kegiatan pengolahan kerupuk ikan mempunyai kinerja cukup bagus. Pokmas ini tidak mempunyai kendala bahan baku berupa ikan tamban karena jenis ikan ini cukup tersedia sepanjang tahun. Untuk mendapatkan ikan ini juga cukup mudah, karena dapat membeli di pedagang ikan atau langsung ke nelayan di Desa Malang Rapat. Hasil produksi dari Pokmas ini juga sudah difasilitasi oleh

pengelola COREMAP di tingkat kabupaten berupa label merk dagang “ Kerupuk Ikan Endon” . Kendala utama yang dihadapi oleh Pokmas ini adalah pemasaran. Pemasaran hasil produksi Pokmas ini masih sebatas sekitar Desa Malang Rapat. Sese kali ada pesanan dari tamu atau warga dari Tanjung Pinang untuk oleh-oleh dan dibawa ke luar kota.

Pokmas lainnya yang cukup baik perkembangannya adalah Pokmas jender yang mempunyai kegiatan membuat dodol rumput laut. Pokmas ini telah berhasil memasarkan produksinya sampai ke pasar swalayan di Kota Tanjung Pinang. Hasil produksi dodol rumput laut ini juga sudah mempunyai izin produksi dari POM Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Namun demikian, pada pertengahan tahun 2011, kinerja Pokmas ini mengalami sedikit kemunduran disebabkan berkurangnya kekompakan para anggota. Tidak adanya kesesuaian tentang pengelolaan internal kelompok yang membuat para anggota ada yang mengundurkan diri.

Pokmas yang memproduksi rempeyek dan kue-kue untuk dipasarkan di dalam desa juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Meskipun hasil produksi masih terbatas dan pemasarannya juga hanya dalam lingkup warung-warung yang ada di desa, usaha pembuatan rempeyek dan kue-kue ini cukup berkembang baik. Para anggota telah dapat mencicil dana pinjamannya. Demikian pula dengan salah satu Pokmas jender yang semula melakukan kegiatan pengolahan ikan asin, karena keterbatasan bahan baku maka kelompok ini juga memproduksi kripik ubi dan kue-kue dan hasilnya juga cukup menggembirakan.

Ke empat Pokmas yang sudah tidak beraktifitas adalah satu Pokmas dengan kegiatan wisata bahari, dua Pokmas budidaya kerapu dan satu Pokmas budidaya lele. Usaha wisata bahari ini dilakukan dengan membangun kelong apung yang difungsikan sebagai tempat

pemancingan umum. Meskipun telah ditempatkan di lokasi strategis yang banyak dikunjungi wisatawan, tetapi pemanfaatan kelong sebagai tempat pemancingan tidak maksimal. Masih sedikit wisatawan yang memanfaatkan kelong sebagai tempat pemancingan kemungkinan berkaitan dengan masih kurangnya promosi dan pengelolaan yang belum profesional.

Perkembangan Pokmas dengan kegiatan budidaya kerapu mengalami stagnasi. Pada awal kegiatan, Pokmas ini cukup berhasil karena hasil panennya cukup baik dan keuntungannya dapat dipakai untuk membeli benih dan selebihnya dibagikan kepada para anggota. Namun dalam perkembangannya, karena sebagian anggota tidak aktif lagi, kegiatan Pokmas ini untuk sementara berhenti dan keramba yang sudah dibangun telah mulai rusak. Hal yang sama juga dialami oleh Pokmas Sembilang yang mengupayakan budidaya lele. Kegiatan ini juga sudah tidak ada lagi dikarenakan biaya operasional yang sudah tidak ada.

Capaian Non-Ekonomi

† Tujuan utama COREMAP adalah penyelamatan terumbu karang supaya dimanfaatkan secara lestari dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, selain ukuran keberhasilan dari aspek ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat keberhasilan COREMAP juga dapat dilihat dari aspek sosial yaitu adanya peningkatan dan kepedulian serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelamatan terumbu karang.

Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat akan pentingnya penyelamatan terumbu karang menjadi faktor kunci dari keberhasilan COREMAP. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyadaran masyarakat (*public*

awareness/PA). Luaran dari kegiatan sosialisasi dan PA adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dari kegiatan yang merusak terumbu karang menjadi kegiatan yang positif untuk menjaga dan melindungi terumbu karang.

- **Perubahan Perilaku**

Kerusakan terumbu karang dapat terjadi akibat pengaruh alam, seperti ombak besar/badai, peningkatan suhu/pemanasan, serta kegiatan manusia yang merusak seperti penggunaan bus/potas/sianida dan bom dalam menangkap ikan. Oleh karena itu, adanya perubahan perilaku dari kegiatan merusak ke kegiatan yang bersifat memelihara dan menjaga menjadi faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan program.

Kajian secara kualitatif mengungkapkan bahwa sejak dilakukan sosialisasi COREMAP tahun 2006/2007 hingga tahun 2011 telah terjadi perubahan perilaku masyarakat, khususnya nelayan di Kawasan Gunung Kijang. Perubahan perilaku tersebut terutama terjadi pada nelayan yang semula menggunakan alat dan bahan yang merusak terumbu karang dalam menangkap ikan, seperti bus/potas/sianida dan bom, berganti menjadi alat dan bahan yang tidak merusak, seperti pancing dan jaring.

Penggunaan alat dan bahan yang merusak seperti bus/potas/sianida di Kawasan Gunung Kijang, pada khususnya, dan di wilayah Kabupaten Bintan, pada umumnya, dilakukan sejak kira-kira tahun 1990-an. Kegiatan *illegal* ini cukup marak dilakukan untuk memenuhi target tangkapan karena permintaan ikan hidup untuk tujuan ekspor ke Singapura dan Hongkong cukup tinggi. Sebagai komoditi ekspor, ikan hidup merupakan target tangkapan yang diandalkan oleh nelayan karena harganya yang sangat menjanjikan. Dengan menggunakan alat dan bahan seperti potas/bus/sianida,

nelayan bisa mendapatkan target tangkapan dengan mudah dan dalam jumlah yang cukup besar.

Tidak berbeda dengan permintaan pasar luar negeri terhadap ikan hidup, permintaan pasar dalam negeri pada ikan segar juga meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan perdagangan ikan segar, para nelayan berupaya meningkatkan hasil tangkapan dengan menggunakan bom sebagai alat tangkap. Penggunaan bom ini cukup menguntungkan karena dengan waktu dan wilayah tangkap yang tidak terlalu jauh sudah bisa mendapatkan hasil tangkapan yang cukup banyak. Penggunaan bom untuk menangkap ikan di kawasan perairan di sekitar Kijang umumnya tidak dilakukan oleh nelayan setempat.

Kegiatan pengeboman yang terjadi di kawasan perairan di sekitar Gunung Kijang dan di wilayah Kepulauan Riau juga menunjukkan penurunan sejak kegiatan sosialisasi dan kegiatan ini dilarang dan adanya yang dilakukan oleh COREMAP. Menurut nelayan setempat, penggunaan bom hampir sudah tidak ada lagi. Beberapa tahun sebelumnya masih terdengar suara ledakan bom di tengah laut.

Kesadaran akan pentingnya menyelamatkan dan melestarikan terumbu karang yang tercermin dari perubahan perilaku ini perlu dijaga dan dipertahankan. Upaya untuk tetap menjaga agar para nelayan tidak kembali lagi menggunakan bahan dan alat tangkap yang merusak perlu tetap dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah pelaksanaan kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA).

• **Manfaat Pembangunan Sarana Fisik Desa**

Sarana fisik desa merupakan salah satu bantuan yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan COREMAP supaya tujuan COREMAP dapat tercapai dengan lebih baik dan lebih cepat. Sarana fisik yang dibangun di Desa Malang

Rapat adalah tambatan perahu, bangsal kerja dan ruang promosi, pondok informasi, serta sarana MCK. Sementara itu, sarana fisik yang dibangun di Desa Gunung Kijang adalah tambatan perahu, pondok informasi, sarana MCK, tempat pembuangan sampah, sarana air bersih, dan pengerasan jalan. Berbagai sarana fisik yang dibangun tersebut memberikan manfaat yang cukup bervariasi. Hasil observasi, wawancara, dan survai menunjukkan adanya sarana fisik yang memberikan manfaat sangat besar, namun ada pula yang memberikan manfaat sangat kecil.

— Tambatan Perahu

Tambatan perahu yang dibangun di kedua desa telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi nelayan dan masyarakat pesisir di kedua desa. Dengan adanya tambatan perahu, nelayan menjadi lebih mudah menambatkan perahunya; proses naik turun awak nelayan/penumpang dan hasil tangkapan pun menjadi lebih mudah; serta konstruksinya yang kokoh pun membuat perahu yang ditambatkan menjadi lebih aman. Selain itu, dengan terpusatnya kegiatan menurunkan hasil laut di satu tempat, yaitu tambatan perahu, mengundang para pembeli hasil tangkap, baik tengkulak, pokmas pembuat kerupuk ikan, maupun konsumen rumah tangga, untuk datang langsung membeli ikan. Hal ini mempermudah nelayan memasarkan hasil tangkapannya. Untuk lebih mendukung kegiatan kenelayanan mereka, termasuk proses pemasaran hasilnya, nelayan di Desa Malang Rapat juga membangun rumah singgah/gudang dan tempat parkir motor.

Besarnya manfaat yang dirasakan oleh nelayan dan masyarakat terhadap tambatan perahu ditunjukkan dan dipertegas dengan hasil survai. Hasil survai menunjukkan sebanyak 63 persen responden menyatakan pembangunan tambatan perahu sangat bermanfaat, 25

persen menyatakan bermanfaat, dan 5 persen menyatakan cukup bermanfaat. Hanya 3 persen dan 2 persen saja yang menyatakan kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat.

— Bangsal Kerja dan Ruang Promosi

Sesuai namanya, sarana fisik yang bernama Bangsal Kerja dan Ruang Promosi dapat difungsikan sebagai tempat *workshop* dan promosi hasil-hasil kegiatan MPA yang dijalankan pokmas-pokmas yang berada di bawah naungan LPSTK Desa Malang Rapat. Namun, dalam kenyataannya, sejak serah terima 23 Februari 2009 (No. 523/COREMAP II/BA/II/2009/32) sampai dengan BME Sosek 2011 dilakukan, sarana fisik ini tidak dimanfaatkan dengan optimal. Pada saat kajian dilakukan, sarana fisik ini terlihat kosong, tidak ada aktivitas, dan terkunci rapat. Padahal, pada saat wawancara, sebagian besar pokmas yang mengembangkan MPA mengeluhkan sulitnya membuka akses pasar yang lebih luas.

— Pondok Informasi

Pemanfaatan pondok informasi yang ada di kedua desa bisa dikatakan berbeda. Di Desa Malang Rapat, pondok informasi tidak pernah dimanfaatkan dengan baik. Bahkan, pengurus LPSTK periode kedua menyatakan tidak pernah memanfaatkannya sama sekali. Pada saat kajian dilakukan, kondisinya terlihat sudah terawat, kosong, terkunci rapat, dan tidak terawat. Bahkan, sekedar papan nama pun tidak ada. Tak heran, apabila sebagian masyarakat dan orang luar bertanya-tanya gedung apakah ini.

Kondisi yang relatif lebih baik, terjadi pada pondok informasi di Desa Gunung Kijang. Meskipun belum optimal, pondok informasi

sudah dimanfaatkan sebagai pusat informasi sekaligus kantor/sekretariat LPSTK. Pada saat kajian dilakukan, pondok informasi terlihat berisi dengan inventaris peralatan kantor. Pada dinding juga terpasang informasi mengenai kegiatan COREMAP dan beberapa poster COREMAP yang diberikan oleh PIU COREMAP dan COREMAP pusat. Di bagian luar juga terlihat adanya papan informasi yang memuat informasi mengenai kegiatan COREMAP. Selain itu, di bagian atas gedung dituliskan nama Pondok Informasi COREMAP II Desa Gunung Kijang untuk menandakan bahwa gedung tersebut adalah pondok informasi. Namun, karena lokasinya kurang strategis, jauh dari pemukiman penduduk, masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkannya.

Padahal kalau dikelola dengan baik, selain digunakan sebagai pusat informasi COREMAP dan sekretariat/kantor LPSTK pondok informasi bisa juga digunakan oleh pihak lain. Pihak desa maupun warga masyarakat lainnya bisa menggunakannya sebagai tempat pertemuan masyarakat, tempat singgah nelayan, maupun penyelenggaraan acara tingkat kampung dan desa, seperti arisan, posyandu, dan lain-lain.

Tidak optimalnya pemanfaatan berujung pada tidak bermanfaatnya pondok informasi tersebut. Hal ini terlihat pada hasil survai yang menunjukkan sebagian besar (43 persen) responden menyatakan pondok informasi tidak bermanfaat dan 11 persen menyatakan kurang bermanfaat. Sedangkan, responden yang menyatakan sangat bermanfaat hanya 8 persen, ditambah 16 persen menyatakan bermanfaat, dan 6 persen cukup bermanfaat. Yang menarik lagi adalah cukup banyaknya responden yang tidak tahu adanya pondok informasi, yaitu sebesar 16 persen.

— Sarana MCK dan Tempat Sampah

Keberadaan MCK di kedua desa dan tempat sampah di Desa Gunung Kijang memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun tidak optimal. Hasil survei menunjukkan sebanyak 13 persen responden menyatakan pembangunan MCK dan tempat sampah sangat bermanfaat, sebanyak 27 persen menyatakan bermanfaat, dan sebanyak 19 persen menyatakan cukup bermanfaat. Sementara itu, responden yang menyatakan kurang dan tidak bermanfaat, masing-masing sebanyak 22 persen dan 10 persen. Manfaat yang paling besar diberikan oleh sarana MCK dan diikuti oleh tong sampah. Sementara itu, untuk tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Kantor Desa Gunung Kijang terlihat sudah tidak dimanfaatkan lagi.

— Sarana Air Bersih

Keberadaan sarana air bersih berupa bak penampungan air permanen yang dilengkapi dengan pompa untuk menyedot air dan mengalirkannya ke sarana MCK bantuan COREMAP dan beberapa sarana MCK umum lainnya, seperti sarana MCK mesjid telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setelah adanya sarana air bersih, masyarakat Desa Gunung Kijang menjadi lebih mudah mendapatkan air bersih.

— Pengerasan Jalan

Pengerasan jalan yang dibantu oleh COREMAP telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat menjadi lebih mudah dan lebih nyaman mengakses jalan yang telah dilakukan pengerasan sehingga mobilitas masyarakat pun menjadi lebih lancar.

Masih banyaknya sarana fisik yang belum memberikan manfaat secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama

adalah ketidakmampuan LPSTK mengelola berbagai sarana fisik tersebut. Faktor yang kedua adalah kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi dari berbagai sarana fisik tersebut. Faktor ketiga adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai sarana fisik tersebut. Rendahnya partisipasi masyarakat bisa jadi karena sejak awal masyarakat merasa tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan berbagai sarana fisik tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, proses pembangunan semua sarana fisik tersebut dilakukan oleh kontraktor. Partisipasi masyarakat dan pihak desa hanyalah menyediakan lahan. Satu-satunya proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan pondok informasi yang dilakukan melalui mekanisme *community contract*.

4.2. Rekomendasi

Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki berbagai kegiatan COREMAP di lokasi program. Hal ini penting karena keberhasilan program penyelamatan terumbu karang melalui COREMAP ini bukan hanya tercapainya indikator, tetapi juga perlunya menjaga kelangsungan program yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pembelajaran yang dapat diambil berdasarkan hasil kajian ini diantaranya adalah:

- Perlunya memilih jenis kegiatan MPA yang sesuai dengan keterampilan dan minat masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan MPA di Kawasan Gunung Kijang yang cukup berhasil terutama Pokmas Jender dengan kegiatan pembuatan kerupuk ikan, kerupuk atom, kerupuk ubi, rempeyek, kue-kue dan dodol rumput laut. Keberhasilan Pokmas Jender ini bila ditelusuri lebih jauh berkaitan dengan beberapa faktor, di antaranya adalah keterampilan dan minat serta kegigihan berusaha

ketua dan para anggota. Ibu-ibu yang menjadi ketua pokmas pembuatan kerupuk ikan pada umumnya telah mempunyai keahlian membuat kerupuk. Begitu pun dengan pembuatan rempeyek, kue-kue, serta dodol rumput laut yang sebetulnya merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh para ibu-ibu. Di samping keterampilan, minat dan kegigihan untuk mengembangkan usaha juga merupakan faktor kunci dari keberhasilan kegiatan MPA.

- Pentingnya memilih jenis kegiatan MPA yang dapat memberikan hasil yang cepat dan dengan resiko kegagalan yang rendah. Paket kegiatan budidaya kepiting bakau dan pembesaran kerapu menjadi pelajaran yang berharga. Kedua paket ini biayanya cukup tinggi, memerlukan ketrampilan tersendiri, waktu panen yang cukup lama (lebih dari setahun), dan resiko kegagalan yang tinggi. Resiko kegagalan diindikasikan dari kematian bibit dan kelangsungan hidup yang rendah dari kerapu dan kepiting. Karena beberapa kendala di atas, maka kegiatan MPA berupa pembesaran kerapu (KJT) dan budidaya kepiting mengalami kegagalan usaha.
- Perlunya memberikan bimbingan teknis dan pendampingan secara regular terhadap Pokmas yang sedang melakukan kegiatan. Walaupun tergolong baru, budidaya lele di Desa Malang Rapat dan Desa Gunung Kijang secara umum cukup berhasil. Kondisi alam yang cocok dan pangsa pasar yang cukup baik terhadap komoditi ini membuat budidaya lele cukup prospektif. Namun demikian, perlu adanya bimbingan teknis secara regular agar usaha ini dapat berkembang baik dengan hasil panen yang optimal. Pendampingan juga diperlukan untuk menjaga kerjasama yang baik antar anggota dalam mengelola kolam pembesaran lele.
- Perlunya mengkaji pola kerja secara berkelompok. Hasil kajian ini menemukan bahwa salah satu faktor yang membuat beberapa

kegiatan Pokmas mengalami kegagalan usaha adalah sistem dan pola kerja kelompok. Kurangnya kepercayaan antar anggota dan pengurus (ketua dan bendahara) mengakibatkan kerjasama dalam mengelola usaha di dalam kelompok berkurang yang pada akhirnya berakibat pada kegagalan usaha.

- Pembelajaran yang dapat diambil dari pola kerja kelompok dari beberapa kegiatan MPA yang cukup berhasil di Desa Gunung Kijang dan Desa Malang Rapat adalah sistem kerja dan peran dari ketua kelompok dalam mengelola usaha. Sistem kerja yang dipakai adalah ketua kelompok sebagai pelaku utama dari kegiatan, sedangkan anggotanya sebagai pekerja yang mendapat upah sesuai dengan kontribusi masing-masing. Sistem kerja kelompok seperti ini mengurangi konflik dan kegiatan juga tidak terganggu seandainya ada beberapa anggota yang tidak aktif karena berbagai alasan. Demikian pula dengan Pokmas budidaya lele yang masih bertahan sampai sekarang, sistem kerja yang dipakai adalah menugaskan salah satu anggota Pokmas untuk memelihara kolam (memberi makan, menempatkan dan memilah-milah lele sesuai ukuran pada masing-masing kolam, serta mengontrol air) sebagai pekerja upahan. Dengan sistem ini, pemeliharaan kolam tidak terganggu, walaupun tidak semua anggota aktif berperan serta dalam pemeliharaan ikan.
- Pentingnya mensosialisasikan beberapa bangunan sarana yang telah dibangun oleh COREMAP. Sarana fisik desa yang dibangun oleh COREMAP di Desa Malang Rapat dan Gunung Kijang cukup beragam, namun tidak semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor adalah kurangnya pengetahuan warga tentang keberadaan dan fungsi dari sarana fisik yang telah dibangun tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti pertemuan desa, pertemuan informal dan acara keagamaan. Pondok Informasi misalnya dapat

dimanfaatkan untuk acara posyandu, arisan warga, atau tempat pertemuan LPSTK dan poknas. Di samping itu, cukup penting pula untuk memberikan tanda atau tulisan pada setiap bangunan fisik desa yang didanai oleh COREMAP. Ini diperlukan untuk menyebarluaskan pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bangunan yang tujuannya supaya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung upaya pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi, termasuk sejak proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya.

- Pentingnya menjaga dan mempertahankan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mendukung upaya penyelamatan dan pelestarian terumbu karang. Partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung program yang telah terbangun perlu didukung oleh berbagai kegiatan yang menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat sehingga perilaku yang positif dalam memelihara dan menjaga terumbu karang tidak berubah kembali menjadi perilaku yang merusak.

DAFTAR PUSTAKA

CRITIC-COREMAP Bintan. *Galeri Foto Kegiatan COREMAP Kabupaten Bintan*. http://regional.coremap.or.id/bintan/galeri_foto/ diunduh tanggal 10 November 2011.

CRITC-LIPI. 2011. *Hasil BME Ekologi Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Paper dipresentasikan pada Workshop Nasional CRITC, Jakarta 2-3 November 2011.

Departemen Kelautan dan Perikanan-Republik Indonesia. 2004. *Sambutan Direktur Jendral Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Pada Peluncuran Proyek Pengelolaan Dan Rehabilitasi Terumbu Karang dan Pemantapan Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut*. <http://www.dkp.go.id/content.php?c=1530>.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan. 2011a. Laporan Penyuluh COREMAP II Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan April 2011. Bintan: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.

-----, 2011b. Status Sarana Sosial di Lokasi COREMAP Kabupaten Bintan Tahun 2004-2009. Bintan: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.

Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. 2005. *Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang*. Jakarta: DKP

-----, 2007. *Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP II*. Jakarta: DKP

- Pemerintahan Desa Malang Rapat. 2010. *Monografi Desa Malang Rapat Tahun 2010*. Bintan: Kantor Desa Malang Rapat.
- Pemerintahan Desa Gunung Kijang. 2010. *Monografi Desa Gunung Kijang Tahun 2010*. Bintan: Kantor Desa Gunung Kijang
- Romdiati, H. dan E. Djohan, 2009. Perkembangan Pendapatan Masyarakat COREMAP II Desa Malang Rapar dan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI